

**MANAJEMEN PARIWISATA AIR TERJUN BANTIMURUNG
KABUPATEN MAROS**

MUHAMMAD ASWAR DARWIS

Nomor Stambuk : 10561 03817 10



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**MANAJEMEN PARIWISATA AIR TERJUN BANTIMURUNG
KABUPATEN MAROS**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

MUHAMMAD ASWAR DARWIS

Nomor Stambuk: 10561 03817 10

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Manajemen Pariwisata Air Terjun Bantimurung
Kabupaten Maros
Nama Mahasiswa : Muhammad Aswar Darwis
Stambuk : 10561 03817 10
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Drs. Alimuddin Said, M.Pd

Pembimbing II

Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan

Fisipol Binismuh Makassar



Dr. H. Saleh Molla, MM

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor :1112/FSP/A.1-VIII/VIII/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada Hari Kamis, Tanggal 24 Agustus 2017.

TIM PENILAI

Ketua,

Ir. H. Saleh Molla, MM

Sekretaris,

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)

2. Drs. Alimuddin Said, M.Pd

3. Drs. Ruskin Azikin, MM

4. Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Aswar Darwis

Nomor Stambuk : 10561 03817 10

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 5 Juni 2017

Yang Menyatakan,

Muhammad Aswar Darwis

ABSTRAK

MUHAMMAD ASWAR DARWIS. Manajemen Pariwisata Air Terjun Bantimurung Kabupaten Maros (dibimbing oleh Alimuddin Said dan Adnan Ma'ruf).

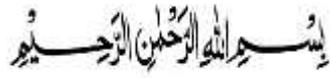
Manajemen Pariwisata Air Terjun Bantimurung Kabupaten Maros, memfokuskan permasalahan pada 4 (empat) prinsip dasar pengelolaan yaitu perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*) dan Pengawasan (*controlling*). Dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pariwisata seperti Obyek dan Atraksi Wisata, Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Kepariwisataaan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengelolaan air terjun Bantimurung dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tipe penelitian fenomenologi. Informan penelitian berjumlah 17 orang dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumen. Sementara analisa data secara kualitatif dilakukan secara sistematis yakni reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan air terjun Bantimurung Kabupaten Maros didasarkan atas beberapa aspek yakni: (1) Aspek perencanaan yang terdiri dari penetapan tujuan dan arah sudah berjalan dengan cukup baik; (2) Aspek Pengorganisasian yang terdiri dari pengaturan sumber daya dan penyusunan aktivitas kegiatan telah berdasarkan pada arah kebijakan dan sasaran strategis yang; (3) Aspek penggerakan yang terdiri dari penggerakan anggota dan kerja sama sudah dijalankan sebagaimana mestinya; (4) Aspek Pengawasan yang terdiri dari standar kegiatan dan penilaian kegiatan telah dilakukan secara obyektif dan berkelanjutan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros beserta Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung.

Keyword: Manajemen, Air Terjun Bantimurung, dan DISBUDPAR

KATA PENGANTAR



Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Manajemen Pariwisata Air Terjun Bantimurung Kabupaten Maros”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Drs. Alimuddin Said, M.Pd selaku pembimbing I dan Ayahanda Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Drs. H. Muhammad Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Kedua orang tua tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendo'akan serta memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini.
5. Buat saudara-saudaraku tercinta, yang senantiasa memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi kepada penulis.
6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.
7. Buat teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 010, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan pengertiannya selama ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 5 Juni 2017

Penulis,

Muhammad Aswar Darwis

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Halaman Penerimaan Tim	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Konsep Manajemen	9
1. Pengertian Manajemen	9
2. Fungsi Manajemen	11
B. Konsep Manajemen Pariwisata	14
1. Pengertian Pariwisata	14
2. Jenis-jenis Pariwisata	17
3. Pariwisata Berkelanjutan	20
4. Prinsip Dasar Manajemen Pariwisata Berkelanjutan	22
5. Upaya Pelestarian Obyek Wisata	24
C. Manajemen Pariwisata Air Terjun Bantimurung	26
1. Rencana Pengembangan Obyek Wisata Bantimurung	26
2. Arah dan Strategi Pengembangan Obyek Wisata Bantimurung	29
D. Kerangka Pikir	32
E. Fokus Penelitian	33
F. Deskripsi Fokus Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Informan Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39
G. Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43

A.	Deskripsi Obyek Penelitian	43
1.	Keadaan Pegawai	43
2.	Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros	49
3.	Struktur Organisasi	50
B.	Manajemen Pariwisata Air Terjun Bantimurung Kabupaten Maros	52
C.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Pariwisata Air Terjun Bantimurung	77
BAB V	PENUTUP	88
A.	Simpulan	88
B.	Saran	89
	DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL

<i>Nomor</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
1.1	Indikator Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	23
2.1	Karakteristik Informan Penelitian	37
4.1	Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia/Umur	44
4.2	Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	45
4.3	Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
4.4	Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan	46
4.5	Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja	48
4.6	Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Tingkat	49
4.7	Obyek Wisata di Kabupaten Maros	56

DAFTAR GAMBAR

<i>Nomor</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
1	Bagan Kerangka Pikir	33
2	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan di Indonesia. Hal ini terbukti pariwisata telah memberikan kontribusi yang sangat besar yaitu sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas bumi. Ada berbagai jenis pariwisata yang dapat dikembangkan. Saat ini secara garis besar ada enam jenis pariwisata berdasarkan tujuannya, yakni pariwisata untuk menikmati perjalanan, pariwisata untuk rekreasi, pariwisata untuk kebudayaan, pariwisata untuk olahraga, pariwisata untuk urusan dagang, dan pariwisata untuk berkonvensi. Oleh karenanya, diperlukan sebuah manajemen yang baik dalam meningkatkan daya tarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah.

Manajemen di bidang pariwisata merupakan suatu tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya dalam bidang pariwisata. Pariwisata hingga saat ini merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi atau pemasukan yang besar bagi pembangunan (baik dalam skala regional maupun nasional). Adapun tujuan pariwisata dalam skala regional adalah agar dapat memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata khususnya di kawasan wisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros serta memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi masyarakat pribumi yang berdomisili disekitar kawasan air

terjun Bantimurung Kabupaten Maros. Sedangkan tujuan pariwisata dalam skala nasional adalah dapat memperkenalkan kekayaan alam dan budaya bangsa. Pariwisata juga merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai macam badan usaha, seperti biro perjalanan, usaha pemandu wisata, penginapan, jasa transportasi, restoran dan memperkenalkan kebudayaan serta kesenian daerah setempat.

Selain hal tersebut, pengembangan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya bangsa, dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam. Pemanfaatan disini bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih berarti mengelola, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik wisata. Oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatan potensi pariwisata yang dimiliki daerah juga dikelola oleh masing-masing daerah. Sebab pariwisata bukanlah sekedar rekreasi, liburan, atau aktivitas perjalanan yang mengesankan, namun pariwisata secara kontekstual adalah merupakan jalan kemakmuran bagi suatu daerah untuk menarik devisa, memperluas usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat disekitarnya.

Objek dan daya tarik pariwisata memerlukan sebuah pengelolaan yang sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan berbagai sumber daya wisatanya secara berdaya guna agar tercapainya sasaran yang diinginkan. Demikian halnya dengan Kabupaten Maros yang memiliki berbagai potensi dibidang pariwisata yang tidak kalah bagusnya dengan daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan khususnya

wisata alam. Kabupaten Maros memiliki sebuah air terjun yang terbentuk secara alami dan sudah dikenal sejak dulu yaitu air terjun Bantimurung. Air terjun Bantimurung merupakan salah satu daya tarik wisata yang digemari oleh wisatawan lokal maupun domestik.

Air terjun Bantimurung berada di wilayah Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, air terjun ini memiliki lebar 20 meter dan tinggi 15 meter. Di bawah curahan air terjun terdapat sebuah tempat pemandian dari landasan batu kapur yang keras dan tertutup lapisan mineral akibat aliran air selama ratusan tahun. Lokasi Kawasan Wisata Bantimurung sangat strategis bisa dijangkau dari berbagai jurusan dan dilintasi oleh jalan lintas Kabupaten Maros-Bone menjadikan lokasi ini semakin menarik untuk dikunjungi. Objek wisata ini tak jauh dari Ibu Kota Provinsi. Dari Makassar hanya berjarak \pm 42 km dan dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pun hanya berjarak \pm 24 km dan dapat ditempuh dalam waktu \pm 1 jam dengan menggunakan kendaraan roda empat. Selain itu, kawasan ini memiliki nilai sejarah yang terkait dengan kebudayaan masa Patahoeddin Daeng Paroempa Sultan Iskandar Muda Matinroe ri Masigi'na (Karaeng Simbang) yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Selain air terjun, terdapat objek wisata lain di sekitar kawasan ini yakni goa mimpi dan goa batu. Goa mimpi merupakan salah satu tempat yang digemari. Karena di dalam goa terdapat stalaktit (relief batu yang terbentuk dari tetesan air dan menggantung di atas langit-langit goa) indah dengan kumpulan kristal. Selain itu, kondisi alam tropis yang subur menjadikan kawasan ini sebagai pemukiman ideal bagi berbagai jenis kupu-kupu.

Keunikan dari daya tarik wisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros ini tidak terlepas dari nilai-nilai kebudayaan dan sejarah masa lalu. Tidak heran jika di kawasan air terjun ini mampu menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke kawasan tersebut. Sekaligus untuk menunjang devisa atau pemasukan daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat disekitarnya. Dilokasi wisata ini tersedia beberapa tempat peristirahatan bungalow dan wisma bagi para pengunjung yang ingin lebih lama menikmati keindahan alamnya. Di sepanjang jalan masuk ke lokasi terdapat sejumlah pedagang souvenir kupu-kupu berbentuk gantungan kunci ataupun hiasan dinding dengan harga bekisar antara Rp. 5.000 hingga Rp. 25.000.

Pengelolaan kawasan wisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros harus memperhatikan kaidah dari fungsi manajemen agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Terry dalam Hasibuan (2005: 3-4), bahwa fungsi manajemen tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer secara berurutan supaya proses manajemen itu diterapkan secara baik, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Perencanaan yang dimaksud adalah bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten maros dalam hal ini Dinas Pariwisata melakukan suatu tindakan pengelolaan terhadap kawasan pariwisata air terjun Bantimurung secara tepat dengan menghubungkan fakta yang ada serta mendengarkan berbagai masukan/asumsi dari berbagai kalangan masyarakat mengenai kawasan pariwisata air terjun Bantimurung. Selanjutnya setelah menetapkan berbagai tujuan dan menyusun rencana/program untuk mencapainya,

maka mereka perlu merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses. Adapun yang dimaksud dengan penggerakan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian yang kemudian melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan air terjun Bantimurung tersebut secara intens.

Kawasan air terjun Bantimurung ini dikenal sebagai daya tarik wisata sudah cukup lama, hanya saja banyak potensi-potensi yang ada sebagai daya tarik wisata belum dikembangkan secara maksimal dan profesional baik itu kawasan gua, penangkaran kupu-kupu, relief batu dan tempat peristirahatan bagi para wisatawan (wisma, kafe dan rumah makan). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Pariwisata harus mampu mengelola kawasan wisata air terjun Bantimurung secara tepat dan berdaya guna dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan disekitarnya. Pengelolaan kawasan pariwisata Bantimurung ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Maros No. 23/III/2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengelola Khusus Bandara dan Kawasan Bantimurung.

Pertumbuhan dan aktivitas warung-warung dan kafe-kafe secara tidak terkendali dan kurang tertata dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah keindahan, kelestarian lingkungan dan keamanan telah menurunkan daya tarik utama di kawasan air terjun Bantimurung. Bahkan terdapat beberapa kafe dan warung yang menjual minuman keras yang meresahkan masyarakat. Hal ini dapat menurunkan

citra positif kawasan air terjun Bantimurung sehingga mengurangi minat wisatawan untuk berwisata ke dalam kawasan air terjun. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan semangat dan visi pengembangan kawasan air terjun Bantimurung sebagai tujuan wisata andalan yang menitikberatkan pada keindahan alam dan pelestarian budaya setempat.

Kurangnya pengawasan serta perhatian yang lebih dari Pemerintah Kabupaten Maros dalam pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan air terjun Bantimurung sebagai daya tarik wisata, mengakibatkan kawasan air terjun ini belum dikelola secara profesional dalam arti bahwa sumberdaya manusia yang mengelola kawasan wisata tersebut kurang memiliki kompetensi yang dibutuhkan (kurang memiliki keahlian dalam bidang pariwisata), sarana dan prasarana yang tidak terawat dengan baik serta sumber daya alam yang menunjang belum mampu untuk dioptimalkan sebagai sebuah peluang ekonomi yang dapat menambah pemasukan daerah. Permasalahan yang didapati juga yaitu kurangnya partisipasi maupun kerjasama masyarakat lokal terhadap pelaksanaan pariwisata di kawasan air terjun ini. Dari berbagai permasalahan yang ada mengenai keberadaan kawasan air terjun Bantimurung menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros untuk perlunya mengelola kawasan air terjun Bantimurung yang nantinya dapat dijadikan pedoman sekaligus acuan bagi Pemerintah sendiri, pihak investor maupun masyarakat lokal dalam upaya mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Maros, dan juga dijadikan sebagai langkah awal yang sangat penting untuk penentuan langkah-langkah lanjutan yang lebih operasional.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Manajemen Pariwisata Air Terjun Bantimurung Kabupaten Maros”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pariwisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pariwisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi manajemen pariwisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengelolaan pariwisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah, pengetahuan dan pengalaman dalam mengkaji dan mengembangkan daya tarik wisata khususnya di kawasan air terjun Bantimurung Kabupaten Maros.

- b. Dapat menambah literatur bahan kajian penelitian dalam pengembangan sebuah daya tarik wisata kepada peneliti-peneliti selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
- a. Sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam mengembangkan daya tarik wisata khususnya kawasan air terjun Bantimurung.
 - b. Diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam merumuskan strategi kebijakan yang tepat, khususnya dalam mengembangkan Kawasan air terjun Bantimurung sebagai daya tarik wisata di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata *manage* itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, *maneggio*, yang diadopsi dari Bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus*, yang artinya tangan (Samsudin, 2006: 15). Sedangkan secara terminologi adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Terry dalam Hasibuan, 2001: 3).

Manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan (Gulick dalam Wijayanti, 2008: 1). Sedangkan menurut Panggabean (2003: 13), manajemen adalah sebuah proses yang terdiri atas fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien.

Manajemen merupakan proses kegiatan yang terdiri dari berbagai macam fungsi manajemen dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah

ditetapkan sebelumnya melalui organisasi. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan sebuah instansi atau perusahaan, pegawai dan masyarakat.

Lebih lanjut menurut Follet dalam Handoko (2008: 3), menjelaskan bahwa manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan. Sedangkan menurut Manulang dalam Atik dan Ratminto, (2012: 1), mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Manajemen yang baik adalah hasil pikiran dan karya manusia, sekalipun manusia didukung oleh peralatan dan keuangan yang memadai, tetapi yang menentukan baik buruknya manajemen adalah cara berfikir dan bertindak. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. Manajemen mengandung tujuan yang hendak dicapai, manajemen meliputi usaha-usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain, didalam usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi

tersebut. Demikian halnya pada instansi pemerintah diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraannya agar mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian-pengertian manajemen yang telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditentukan dalam hal ini adalah manajemen pariwisata air terjun Bantimurung di Kabupaten Maros.

2. Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Manajemen memberikan tekanan terhadap kenyataan bahwa manajer mencapai tujuan atau sasaran dengan mengatur karyawan dan mengalokasikan sumber-sumber material dan finansial. Bagaimana manajer mengoptimasi pemanfaatan sumber-sumber, memadukan menjadi satu dan mengkonversi hingga menjadi output, maka manajer harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan.

Menurut Daft dalam Choliq (2011: 36), manajemen mempunyai empat fungsi, yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepemimpinan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*). Dari fungsi dasar

manajemen tersebut, kemudian dilakukan tindak lanjut setelah diketahui bahwa yang telah ditetapkan “tercapai” atau “belum Tercapai”. Sedangkan menurut Fayol dalam Safroni (2012: 47), fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*commanding*), pengkoordinasian (*coordinating*), pengendalian (*controlling*). Dari fungsi-fungsi manajemen tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer secara berurutan supaya proses manajemen itu diterapkan secara baik (Hasibuan, 2005: 3-4). Persamaan tersebut tampak pada beberapa fungsi manajemen di bawah ini:

a. Perencanaan (*planning*)

Menurut Terry dalam Purwanto (2006: 45), *planning* atau perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan merupakan proses dari rangkaian kegiatan untuk menetapkan terlebih dahulu tujuan yang diharapkan pada suatu jangka waktu tertentu atau periode waktu yang telah ditetapkan, serta tahapan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tersebut (Sastrohadiwiryo, 2005: 25).

Perencanaan tersebut mencakup; (1) menetapkan tujuan; (2) mengembangkan berbagai premis mengenai lingkungan perusahaan dimana tujuan-tujuan perusahaan hendak dicapai; (3) memilih arah tindakan (*courses of action*) untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut; (4) merumuskan berbagai aktifitas

yang diperlukan untuk menerjemahkan rencana menjadi aksi; dan (5) melakukan perencanaan ulang untuk mengoreksi berbagai kekurangan dalam perencanaan terdahulu. (Koontz dan Weihrich dalam Solihin, 2009: 4).

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian yaitu penentuan penggolongan dan penyusunan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan, penentuan orang-orang yang akan melaksanakan, penyediaan alat-alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dan pendelegasian wewenang yang ditugaskan dalam bidang aktivitas masing-masing (Rachmat, 1986: 41). Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. (Terry dan Rue, 2010: 82).

c. Penggerakan/Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Penggerakan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian (Purwanto, 2006: 58).

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga

pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar (Purwanto, 2006: 67). Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karenanya agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana (Manullang, 1982: 174).

B. Konsep Manajemen Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Pariwisata secara singkat dapat dirumuskan sebagai kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan (Soekadijo, 2000: 2).

Menurut Marpaung (2002: 13), mendefinisikan pariwisata sebagai perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Aktivitas dilakukan selama mereka tinggal di tempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Hadwin (2013), pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau

keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu:

- a. Harus bersifat sementara
- b. Harus bersifat sukarela (*voluntary*) dalam arti tidak terjadi karena dipaksa
- c. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jadi pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan manusia ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya dalam waktu paling tidak satu malam dengan tujuan perjalanannya bukan untuk mencari nafkah, pendapatan atau penghidupan di tempat tujuan.

Salah satu yang sangat berhubungan dengan pariwisata yaitu obyek wisata yang mempunyai pengertian yaitu tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang di kunjungi wisatawan. Obyek wisata dapat berupa obyek wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut atau berupa obyek wisata bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah dan lain-lain. Obyek dan daya tarik wisata umumnya terdiri atas hayati dan non hayati, dimana masing-masing memerlukan pengelolaan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya, pengelolaan obyek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan berbagai sumber daya wisatanya secara berdaya guna dan agar

tercapainya sasaran yang diinginkan. Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azasi manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang.

Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Wisata merupakan suatu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Sedangkan wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata (Yoeti, 1997: 194). Pada garis besarnya, definisi tersebut menunjukkan bahwa kepariwisataan memiliki arti keterpaduan yang di satu sisi diperani oleh faktor permintaan dan faktor ketersediaan. Faktor permintaan terkait oleh permintaan pasar wisatawan domestik dan mancanegara. Sedangkan faktor ketersediaan dipengaruhi oleh transportasi, atraksi wisata dan aktifitasnya, fasilitas-fasilitas, pelayanan dan prasarana terkait serta informasi dan promosi (Hadwin, 2013).

Menurut Pitana dan Diarta (2009: 81), mengemukakan semua definisi yang muncul selalu mengandung beberapa unsur, yaitu:

- a. Adanya unsur *travel* (perjalanan), yaitu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain;
- b. Adanya unsur “tinggal sementara” di tempat yang bukan merupakan tempat tinggal yang biasanya, dan;

- c. Tujuan utama dari pergerakan manusia tersebut bukan untuk mencari penghidupan/pekerjaan di tempat yang dituju.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai pariwisata di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pariwisata adalah suatu tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya dalam bidang pariwisata. Selain itu, kegiatan pariwisata memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Terdapat dua lokasi yang saling terkait yaitu daerah asal dan daerah tujuan (destinasi);
- b. Sebagai daerah tujuan pasti memiliki obyek dan daya tarik wisata;
- c. Sebagai daerah tujuan pasti memiliki sarana dan prasarana pariwisata;
- d. Pelaksanaan perjalanan ke daerah tujuan dilakukan dalam waktu sementara;
- e. Terdapat dampak yang ditimbulkan, khususnya pada daerah tujuan baik dari segi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan.

2. Jenis-jenis Pariwisata

Menurut Pendit dalam Hadwin (2013), pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis-jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wisata Budaya

Yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat,

kebiasaan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, budaya dan seni mereka. Seiring perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan budaya, seperti eksposisi seni (seni tari, seni drama, seni musik, dan seni suara), atau kegiatan yang bermotif kesejarahan dan sebagainya.

b. Wisata Maritim atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olah raga di air, lebih-lebih di danau, pantai, teluk, atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi berselancar, balapan mendayung, melihat-lihat taman laut dengan pemandangan indah di bawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan yang banyak dilakukan didaerah-daerah atau negara-negara maritim.

c. Wisata Cagar Alam (Taman Konservasi)

Untuk jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.

d. Wisata Buru

Jenis ini banyak dilakukan di negeri negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara

yang bersangkutan, seperti berbagai negeri di Afrika untuk berburu gajah, singa, ziraf, dan sebagainya.

e. Wisata Konvensi

Yang dekat dengan wisata jenis politik adalah apa yang dinamakan wisata konvensi. Berbagai negara pada dewasa ini membangun wisata konvensi ini dengan menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan tempat bersidang bagi para peserta suatu konferensi, musyawarah, konvensi atau pertemuan lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional.

f. Wisata Pertanian (Agrowisata)

Sebagai halnya wisata industri, wisata pertanian ini adalah pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-lihat keliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka warna dan suburnya pembibitan berbagai jenis sayur-mayur dan palawija di sekitar perkebunan yang dikunjungi.

g. Wisata Ziarah

Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata ziarah banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci, ke makam-makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan, ke bukit atau gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda.

3. Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) berlandaskan pada upaya pemberdayaan (*empowerment*), baik dalam arti ekonomi, sosial, maupun kultural merupakan suatu model pariwisata yang mampu merangsang tumbuhnya kualitas sosio-kultural dan ekonomi masyarakat serta menjamin kelestarian lingkungan. Menurut Yoeti (2008: 242), pariwisata berkelanjutan adalah mempertemukan kebutuhan wisatawan dan daerah tujuan wisata dalam usaha menyelamatkan dan memberi peluang untuk menjadi lebih menarik lagi di waktu yang akan datang.

Hal ini merupakan suatu pertimbangan sebagai ajakan pemerintah agar semua sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan di waktu yang akan datang untuk tujuan ekonomi, sosial, keindahan yang dapat dijadikan daya tarik dengan memelihara integritas keanekaragaman budaya yang ditunjang dengan sistem kehidupan yang ada.

Ide dasar pembangunan berkelanjutan adalah kelestarian sumber daya alam dan budaya. Sumber daya tersebut merupakan kebutuhan setiap orang saat sekarang supaya dapat hidup dengan sejahtera, tetapi harus dipelihara dan dilestarikan agar dapat jga digunakan di masa yang akan datang. Pmanfaatn sumber daya tersebut harus melibatkan masyarakat lokal dan memberikan manfaat optimal bagi mereka.

Menurut Damanik dan Weber (2006: 26), mengartikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan sumber daya (atraksi, aksesibilitas, amenitas) pariwisata yang bertujuan untuk memberikan keuntungan optimal bagi pemangku

kepentingan (*stakeholders*) dan nilai kepuasan optimal bagi wisatawan dalam jangka panjang. Bentuk pembangunan pariwisata berkelanjutan seperti ini didasarkan pada keberhasilan mengembangkan aspek ekonomi dengan wawasan pemeliharaan lingkungan.

Adapun prinsip pariwisata berkelanjutan menurut WTO dalam Hardjasoemantri (2002: 82), dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sumber daya alam, historis, budaya dan lain-lain untuk kepariwisataan dikonversi untuk pemanfaatan berkesinambungan di masa depan, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekarang.
- b. Pengembangan kepariwisataan direncanakan dan dikelola sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan masalah lingkungan dan sosio kultural yang serius di wilayah wisata.
- c. Kualitas lingkungan yang menyeluruh di wilayah wisata dipelihara dan ditingkatkan dimana diperlukan.
- d. Kepuasan wisatawan yang tinggi dipertahankan sehingga daerah tujuan wisata akan tetap memiliki daya jual dan popularitasnya.
- e. Manfaat kepariwisataan terlebas luas di seluruh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan pengelola wajib melakukan manajemen sumber daya yang efektif. Selain itu kita hendaknya mengubah sikap dan berkemauan keras, agar apa yang kita miliki sekarang ini tidak menghabiskan semua sumber daya pariwisata yang ada tanpa mempertimbangkan kehidupan pariwisata di waktu yang akan datang.

4. Prinsip Dasar Manajemen Pariwisata Berkelanjutan

Menurut Richardson dan Fluker (2004: 178), yang harus dicakup dalam manajemen pariwisata paling tidak terfokus pada konsep *values tourism* yang diluncurkan pada tahun 1995 oleh *The Pacific Asia Travel Association* (PATA), yaitu:

- a. Memenuhi kebutuhan konsumen (wisatawan);
- b. Meningkatkan kontribusi ekonomi bagi ekonomi nasional Negara bersangkutan;
- c. Meminimalisir dampak pariwisata terhadap lingkungan;
- d. Mengakomodasi kebutuhan dan keinginan Negara tuan rumah yang menjadi tujuan wisata; dan
- e. Menyediakan pengembalian financial yang cukup bagi orang-orang yang berusaha di pariwisata.

Values atau nilai-nilai yang harus dipertimbangkan manyangkut konsumen, budaya dan warisan budaya, ekonomi, ekologi, finansial, sumber daya manusia, peluang masa depan dan sosial. Menurut Pitana dan Diarta (2009: 86), tujuan dari pengelolaan atau manajemen pariwisata adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dengan pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian keberagaman budaya. Indikator untuk monitoring dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1. Indikator untuk Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

No	Indikator	Ukuran Spesifik
1	Perlindungan lokasi	Daya dukung, tekanan terhadap area dan kemenarikan
2	Tekanan	Jumlah wisatawan yang berkunjung pertahun/bulan/masa puncak
3	Intensitas pemanfaatan	Intensitas pemanfaatan pada waktu puncak (wisatawan/ha)
4	Dampak sosial	Rasio antara wisatawan dan penduduk lokal (pada waktu puncak/rata-rata)
5	Pengawasan pembangunan	Adanya prosedur secara formal terhadap pembangunan di lokasi dan kepadatan pemanfaatan
6	Pengelolaan limbah	Presentase limbah terhadap kemampuan pengelolaan. Demikian pula terhadap rasio kebutuhan dan suplai air bersih
7	Proses perencanaan	Mempertimbangkan perencanaan regional termasuk perencanaan wisata (regional)
8	Ekosistem kritis	Jumlah spesies yang masih jarang dan dilindungi
9	Kepuasan pengunjung	Tingkat kepuasan pengunjung berdasarkan pada kuisisioner
10	Kepuasan penduduk lokal	Tingkat kepuasan penduduk lokal berdasarkan kuisisioner
11	Kontribusi pariwisata terhadap ekonomi lokal	Proporsi antara pendapatan total dengan pariwisata

Sumber: WTO (1994) dalam Pitana dan Diarta (2009: 88)

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam manajemen pariwisata diperlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan di bidang pariwisata untuk mengintegrasikan kerangka manajemen pariwisata. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah staf dari industri pariwisata, konsumen, investor dan developer, pemerhati dan penggiat warisan dan pelestari budaya, pemerintah, dan pelaku ekonomi lokal dan nasional. Pemangku kepentingan tersebut, memiliki harapan dan nilai yang berbeda yang perlu dikelola sedemikian rupa agar diadopsi dan terwakili dalam perencanaan, pengembangan, dan operasionalisasinya. Menurut

Cox dalam Dowling dan Fannel (2003: 2), manajemen pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan;
- b. Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata;
- c. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal;
- d. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal; dan
- e. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/ atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun disisi lain mampu meningkatkan kepadatan masyarakat.

5. Upaya Pelestarian Lingkungan Obyek Wisata

Sebagaimana diketahui bahwa dalam upaya melestarikan tempat wisata agar tetap terjaga maka perlu dilakukan usaha-usaha yang berkaitan dengan terciptanya daya dukung lingkungan obyek wisata, yang akan selalu memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Dalam hal ini, sebisa mungkin pengelola harus senantiasa bekerjasama dengan para pengunjung dan memperhatikan faktor-faktor

yang mempengaruhi terhadap keberlangsungan obyek wisata. Ada tiga faktor menurut Soekadijo (1996: 269) yang dapat menentukan berhasilnya pembangunan pariwisata sebagai industri. Ketiga faktor tersebut adalah:

- a. Tersedianya obyek dan atraksi wisata yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Misalnya: keindahan alam, hasil kebudayaan, kesenian adat istiadat, tata cara hidup suatu masyarakat, festival tradisional dan upacara-upacara keagamaan dan lain-lain sebagainya.
- b. Adanya fasilitas *accessibility*, yaitu prasarana dan sarana perhubungan dengan segala fasilitasnya, sehingga memungkinkan para wisatawan mengunjungi suatu daerah tujuan wisata tertentu.
- c. Tersedianya fasilitas *amenities*, yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan pada wisatawan selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dimanapun kawasan wisata dibina, tata lingkungan alam disekitarnya selalu menjadi tumpuannya, tetapi sangat jarang menjadi perhatian yang memadai untuk pengelolaannya, padahal tata alam disekitar kawasan wisata baik yang masih murni alami maupun yang sudah dibudidayakan oleh manusia keadaannya masih tetap dinamik. Kedinamikan ini masih tetap rentan pada perilaku budaya manusia, dan oleh karenanya memerlukan tata alami sesuai dengan fisiografi kawasan wisata.

Adapun tata laksana pengelolaan menurut Darsoprajitno (2002: 323), meliputi runtutan kegiatan kerja sebagai berikut:

- a. Inventarisasi tata alam dan binaan, sekaligus mempelajari dampaknya;
- b. Pengembangan kebijakan lingkungan yang berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungan;
- c. Mengidentifikasi tanggung jawab masing-masing kelompok kerja pengelola;
- d. Pemanduan tata laksana pengelolaan lingkungan dengan tata laksana pengelolaan organisasi perusahaan;
- e. Tata laksana pengendalian, informasi, pelaporan dan pelatihan pengelolaan lingkungan.

Perencanaan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisata alam maupun sosial budaya harus berdasarkan pada kebijakan rencana pembangunan nasional maupun regional. Jika kedua kebijakan rencana tersebut belum tersusun, tim perencana pengembangan obyek dan daya tarik wisata harus mampu mengasumsikan rencana kebijakan yang sesuai dengan area yang bersangkutan.

C. Manajemen Pariwisata Air Terjun Bantimurung

1. Rencana Pengembangan Obyek Wisata Bantimurung

Objek wisata utama pada taman wisata Bantimurung adalah air terjun, sehingga kegiatan yang ditawarkan adalah wisata tirta. Di samping air terjun, terdapat pula objek wisata lain, yaitu gua alam dan atraksi satwa kupu-kupu yang berterbangan bebas di habitat aslinya. Bantimurung selama ini dikelola oleh Pemerintah Daerah Maros, sehingga fasilitas dan utilitas wisata telah dibangun sejak lama dan cukup memadai.

Adapun pengembangan wisata ke depan akan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas wisata pada

bagian atas air terjun (Danau Toakala dan Kassi Kebo), yang belum dikembangkan, padahal sudah banyak dikunjungi wisatawan. Efektifitas pengelolaan *information centre* yang ada pada blok Bantimurung ini pun akan lebih ditingkatkan efektifitas penggunaan dan pengelolaannya. Fasilitas ini diarahkan agar dapat diakses bebas oleh wisatawan yang membutuhkan informasi terkait objek-objek wisata, potensi keekaragaman hayati dan ekosistemnya dan segala hal terkait pengelolaan wisata dan kawasan TN Bantimurung Bulusaraung pada umumnya.

Diversifikasi kegiatan dan layanan pengunjung juga menjadi salah satu kegiatan pengembangan wisata. Jika selama ini kegiatan wisata hanya terbatas pada wisata massal dengan aktivitas wisata tirta, *sight seeing* dan *caving* wisata, maka perlu dikembangkan layanan lainnya berupa kegiatan outbound dan layanan interpretasi atau pemanduan pengunjung. Kegiatan ini ditujukan sebagai upaya penyampaian dan penyadar-tahuan konservasi kepada masyarakat luas. Untuk pengembangan tersebut dibutuhkan adanya papan-papan informasi/interpretasi lingkungan.

Menurut Cochrane dalam Sutiarmo (2004: 13), menyatakan bahwa kegiatan pariwisata alam tidak mungkin secara sendirian dapat mendukung konservasi pada area yang ditargetkan. Dukungan pemerintah dalam perangkat peraturan-peraturan dan insentif masih esensial dilakukan. Unsur nilai-nilai tradisional yang hidup dimasyarakat, perencanaan yang terintegrasi, dan dorongan pemegang kebijakan dalam wujud peraturan-peraturan dan insentif sangat penting dilakukan sehingga pengembangan dan pengelolaan suatu wilayah dapat menekan bahkan

menghilangkan konflik-konflik kepentingan sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya yang mungkin akan terjadi.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil benang merahnya bahwa pengembangan dan pengelolaan suatu kawasan wisata yaitu khususnya kawasan air terjun Bantimurung tidak terlepas dari adanya campur tangan Pemerintah Kabupaten, Swasta dan melibatkan masyarakat setempat sebagai pendukung pelaksanaan dan tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional masyarakat, agar keunikan dan ciri khas kawasan wisata tersebut berbeda dengan tempat yang lain. Perlunya perencanaan yang integritas sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pelaku kebijakan sebagai landasan untuk untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di kawasan wisata air terjun Bantimurung. Peraturan tersebut diharapkan dapat menghindari konflik-konflik sosial dan kerusakan lingkungan di sekitar kawasan air terjun Bantimurung Kabupaten Maros.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wakka dan Awang (2015: 5), menjelaskan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat terhadap TN Bantimurung Kabupaten Maros berkisar antara 37,96% namun terdapat sebagian masyarakat (16,70%) memiliki tingkat ketergantungan terhadap kawasan TN Bantimurung berkisar antara 66,67-100%. Sementara itu, sebanyak 47,80% masyarakat sekitar kawasan TN Bantimurung tergolong dalam kategori masyarakat sangat miskin. Apabila akses mereka dalam memanfaatkan sumberdaya alam hutan yang terdapat pada kawasan TN Bantimurung dikurangi atau bahkan dihilangkan maka mereka akan sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah arah dan strategi pengembangan TN Bantimurung oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dengan tujuan untuk memberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam meningkatkan ekonominya.

2. Arah dan Strategi Pengembangan Obyek Wisata Bantimurung

Dalam rangka meningkatkan jumlah dan layanan pengunjung dari tahun ke tahun, BTN Bantimurung secara berkesinambungan meningkatkan kualitas dan kuantitas peragaan/program dan SDM-nya sesuai dengan perkembangan animo wisata masyarakat yang kian beragam. Menurut Asriady (2015), upaya-upaya yang dilakukan BTN Bantimurung untuk kegiatan pengembangan adalah sebagai berikut:

a. Pemantapan persiapan dan perencanaan pengembangan wisata

Perencanaan merupakan langkah awal dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Dalam pengembangan wisata BTN Bantimurung perlu disediakan beberapa perangkat perencanaan, termasuk di dalamnya identifikasi dan analisa objek wisata alam yang potensial untuk dikembangkan, serta penguatan data base SDA dan elektronik sebagai bahan dan data dalam analisa pengembangan wisata alam lebih lanjut.

Rencana pengembangan wisata harus didokumentasikan dalam bentuk Rencana Pengembangan Pariwisata Alam (RPPA) pada kawasan TN Bantimurung yang disinergiskan dengan rencana pengelolaan TN Bantimurung, dan Rencana Detail Tata Ruang (RTRW/RTRWK), serta Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPD).

b. Penataan dan penertiban pengelolaan wisata

Beberapa objek wisata alam pada TN Bantimurung masih dikelola oleh pihak-pihak di luar Balai TN Bantimurung, seperti misalnya Taman Wisata Bantimurung dan Taman Purbakala Leang-leang yang masih dikelola oleh Pemerintah Daerah Maros. Padahal Taman wisata Bantimurung mampu menyuplai PAD yang cukup besar, yaitu sekitar \pm Rp. 3 Milyar pertahunnya. Peningkatan efektivitas pengelolaan wisata di unit-unit wisata lainnya (Divisi Unit Leng Lonrong, Bulusaraung, Pattunuang dan Karaenta serta Divisi unit Wisata Minat Khusus) pun akan terus dilakukan, terutama penertiban penarikan retribusi dan pengelolaan pengunjung.

c. Pengembangan pelayanan dan diversifikasi produk wisata

Pelayanan wisata yang telah diselenggarakan TN Bantimurung meliputi pelayanan penerbitan SIMAKSI, penjagaan loket masuk dan penarikan retribusi masuk kawasan konservasi, pendampingan wisata minat khusus, dan pengamanan kegiatan wisata. Kedepan, pengembangan dan diversifikasi produk layanan wisata diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan pengembangan paket-paket wisata yang harus diiringi oleh keahlian dan keterampilan interpretasi dan pendampingan pengunjung.

TN Bantimurung memiliki potensi alam yang beragam yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai objek wisata, baik wisata alam maupun wisata minat khusus. Dengan mengkombinasikan antara kecenderungan dan minat wisatawan dengan potensi-potensi alam yang dimiliki, maka paket-paket wisata yang dapat ditawarkan akan kian beragam.

d. Pengembangan sarana dan prasarana wisata

Pengembangan wisata harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang aman, nyaman dan memadai. Kenyamanan dan kepuasan pengunjung atas keindahan objek wisata alam yang ditawarkan dan kelengkapan dan kenyamanan fasilitas wisata akan mempengaruhi kecenderungan minat wisatawan untuk kembali.

Kelengkapan *utilitas* wisata, terutama wisata minat khusus, akan memberi nilai tambah dan mempengaruhi nilai 'jual' kawasan sebagai objek wisata alam yang layak dikunjungi, misalnya ketersediaan peralatan penelusuran gua bagi para *caver*, baik amati maupun profesional, peralatan *camping*, peralatan *climbing*, dan peralatan khusus lainnya.

e. Pengembangan SDM pengelolaan wisata

Profesionalisme petugas pengelola wisata, baik bagian administrasi maupun operasional harus terus ditingkatkan. Pada bagian administrasi diperlukan petugas yang cekatan, jujur, bertanggung jawab dan ahli dibidangnya, begitu pula tenaga interpreter dan pemandu wisata minat khusus harus menguasai objek-objek wisata hingga seluk beluknya dan memahami aspek keamanan (rescue dan/atau pertolongan pertama) dan kenyamanan wisatawan.

f. Pengembangan Promosi

Secara umum promosi wisata dilaksanakan dengan menyebarkan informasi melalui media massa (baik cetak maupun elektronik), *leaflet*, *booklet*, maupun kegiatan pameran dan event-event khusus lainnya. Untuk

meningkatkan promosi wisata dalam bentuk paket-paket wisata, perlu diintensifkan melalui kerja sama dengan *travel agent* atau biro perjalanan.

g. Monitoring dan Evaluasi

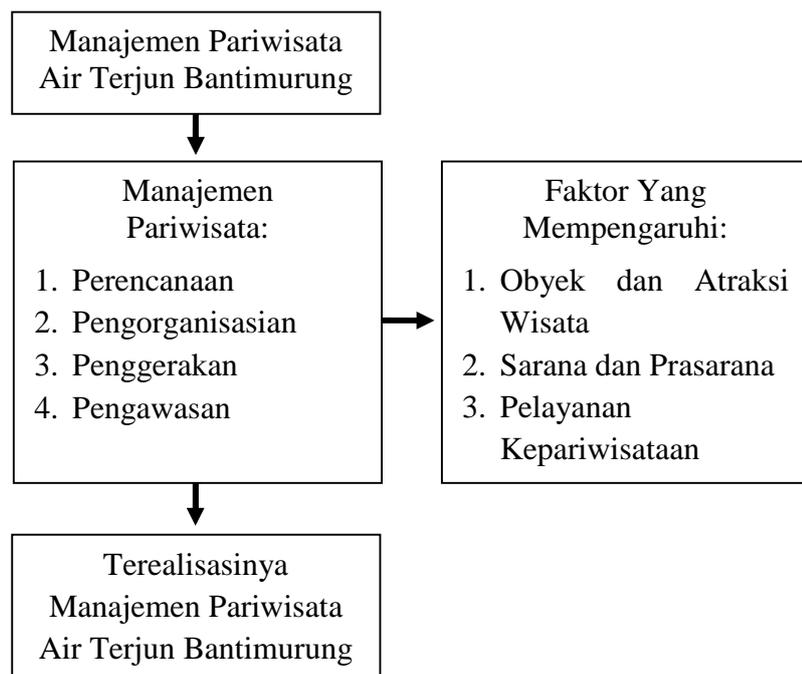
Agar pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wisata alam tetap berjalan pada arah yang benar secara efektif dan efisien, dibutuhkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap segala aspek pengelolaan wisata dan setidaknya dilaksanakan setiap akhir atau awal tahun. Agar monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan perangkat-perangkat lunak monitoring dan evaluasi. Salah satu perangkat yang layak untuk digunakan adalah adanya suatu kriteria dan indikator pengelolaan wisata yang efektif, yang disusun sedemikian rupa sehingga mampu menggambarkan sejauh mana efektifitas pengelolaan dan pengembangan wisata telah dilakukan.

D. Kerangka Pikir

Secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Pariwisata secara singkat dapat dirumuskan sebagai kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan (Soekadijo, 2000: 2). Pengelolaan kawasan wisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros harus memperhatikan kaidah dari fungsi

manajemen agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Terry dalam Hasibuan (2005: 3-4), bahwa fungsi manajemen tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer secara berurutan supaya proses manajemen itu diterapkan secara baik, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Berdasarkan uraian dari kerangka, maka untuk melihat penelitian ini lebih jelas, berikut penulis mencoba menggambarkan alur penelitian seperti yang tampak di bawah ini:

Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari kerangka pikir di atas, maka fokus penelitian ini adalah mengenai:

1. Manajemen pariwisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pariwisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka deskripsi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manajemen pariwisata air terjun Bantimurung adalah suatu tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten maros bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Bantimurung untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dalam bidang pariwisata.
2. Perencanaan dapat diartikan proses dari rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan yang diharapkan dari pengelolaan pariwisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros.
3. Pengorganisasian adalah penyusunan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari pengelolaan air terjun Bantimurung Kabupaten Maros baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.
4. Penggerakan dapat diartikan sebagai menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki oleh para petugas pariwisata air terjun Bantimurung dan aparat di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros untuk dapat bekerja sama serta bekerja secara ikhlas agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
5. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil dari

pengelolaan pariwisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

6. Terealisasinya pariwisata air terjun adalah terwujudnya manajemen pariwisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros secara berdaya guna.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua bulan setelah seminar proposal. Lokasi penelitian dilaksanakan di dua tempat yaitu di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros dan di Balai Taman Nasional Bantimurung dengan tujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan manajemen pariwisata dan faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan pariwisata khususnya di air terjun Bantimurung Maros.

Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada: (1) Dinas Pariwisata Kabupaten Maros dan Balai Taman Nasional Bantimurung merupakan salah satu unsur pemerintah di tingkat kabupaten yang menangani sistem manajemen kepariwisataan; (2) Minimnya pengelolaan dan pengembangan obyek wisata khususnya di kawasan air terjun Bantimurung. Adapun pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas efektifitas, waktu, dana dan kemudahan dalam mengumpulkan data karena lokasi tersebut mudah dijangkau oleh penulis.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai manajemen pariwisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros yang terjadi secara obyektif, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang ruang lingkup

dan proses manajemen pariwisata air terjun Bantimurung di Kabupaten Maros.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan penulis melalui pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan penulis tentang manajemen pariwisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai informasi tertulis seperti laporan dan dokumen yang digunakan dalam penelitian mengenai manajemen pariwisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros.

D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive* yaitu sengaja memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun karakteristik informan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Inisial
1	Drs. H. Rahmat Burhanuddin, M.Si	Kepala DISBUDPAR Maros	RHB
2	Drs. Erhan, M.Si	Sekretaris DISBUDPAR Maros	ERH
3	Hj. Darmawati B. Situru, S.S	Kabid. Pariwisata	DRM
4	Drs. H. Samsir, M.Pd	Kabid. Ekonomi Kreatif	SMR
5	Hj. Rosmiati, S.Sos	Kabid. Kesenian	RSM

6	Muhammad, S.E	Kasubag. Umum, Asset & Kepegawaian	MMD
7	Dra. Tenri Aty	Kasi. Sarana & Prasarana Kesenian	TRA
8	Alamsyah Saehuddin,S.E	Kasi. Usaha Jasa Pariwisata	ASN
9	Muhammad Ridwan, S.Pd	Kasi. Pengembangan SDM & Prestasi Kesenian	MRD
10	Fatmawati, S.Sos	Kasi. SDM & Kelembagaan Ekonomi Kreatif	FTM
11	Andi Irsan, S.Sos	Kasi. Pemasaran & Promosi Pariwisata	ARS
12	Muhammad. Darwis, S.E.,M.M	Kasubag. Perencanaan & Pelaporan	MHD
13	Ir. Dody Wahyu Karyanto, MM	Plt. Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung	DWK
14	Amiruddin	Petugas Jaga Pintu Depan	AMR
15	Machmud, S.Sos	Petugas Retribusi	MCH
16	Dedy Asriady, S.Si.,MP	Kasubag TU Balai TN. Bantimurung Bulusaraung	DDA
17	Muchlis Ramli, SH	Petugas Loket	MHR

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai strategi manajemen pariwisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pariwisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek dari penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, Kasubid. Pengembangan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, Kasubid. Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Maros, Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Maros Seksi Sarana dan Obyek Wisata sebanyak 3 orang, Staf Balai Taman Nasional

Bantimurung Kabupaten Maros sebanyak 3 orang, Masyarakat sebanyak 3 orang, dan Wisatawan sebanyak 3 orang. Adapun wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi penelitian mengenai manajemen pariwisata air terjun Bantimurung Kabupaten Maros.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data pegawai baik pada Dinas Pariwisata Kabupaten Maros maupun pada Balai Taman Nasional Bantimurung, serta data-data potensi obyek wisata khususnya air terjun Bantimurung Kabupaten Maros.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:92-99) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:125) Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2012:127) membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil

pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada. Dengan kata lain triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga

dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Keadaan Pegawai

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Maros. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros berperan dalam upaya memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan kebudayaan. Berbagai program yang telah dilaksanakan, antara lain: (1) internalisasi nilai-nilai luhur, pengetahuan dan teknologi tradisional, serta kearifan lokal yang relevan dengan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti nilai-nilai persaudaraan, solidaritas sosial, saling menghargai (*sipakatau*) (2) peningkatan apresiasi masyarakat terhadap hasil karya kreatifitas seni budaya yang ditandai dengan fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam berbagai pameran, festival, pegelaran, dan pentas seni, serta pengiriman misi kesenian ke berbagai acara ditingkat regional dan nasional sebagai bentuk diplomasi/promosi kesenian daerah.

Jumlah pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros berjumlah 80 orang, yang memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda mulai dari Kepala Dinas sampai kepada para staf.

Adapun keadaan pegawai diuraikan berdasarkan usia/umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan, masa kerja serta golongan tingkat. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia/Umur

No	Tingkat Usia	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	20-30 Thn	2	2,5
2	31-40 Thn	25	31,25
3	41-50 Thn	31	38,75
4	51-60 Thn	22	27,5
Jumlah Total		80	100

Sumber: Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian DISBUDPAR Kab. Maros 2017

Berdasarkan uraian dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pegawai dengan tingkat usia/umur 20-30 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 2,5 persen, sedangkan untuk pegawai yang berusia antara 31-40 tahun berjumlah 25 orang atau sebesar 31,25 persen. Adapun pegawai yang memiliki usia/umur antara 41-50 tahun berjumlah 31 orang atau sebesar 38,75 persen dan pegawai yang memiliki tingkat usia/umur antara 51-60 tahun berjumlah 22 orang atau sebesar 27,5 persen. Dengan demikian, maka penulis menyimpulkan bahwa rata-rata usia dari pegawai yang terdapat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros yaitu usia muda dan paruh baya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pegawai yang bekerja pada kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros ini tergolong produktif karena mayoritas pegawainya berusia antara 31 tahun sampai dengan 50 tahun dengan jumlah pegawai sebanyak 56 orang dari jumlah total pegawai yang bekerja pada Dinas tersebut.

Tabel 4.2**Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Laki-laki	51	63,75
2	Perempuan	29	36,25
Jumlah Total		80	100

Sumber: Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian DISBUDPAR Kab. Maros 2017

Sesuai dengan keterangan dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pegawai dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 51 orang atau sebesar 63,75 persen, sedangkan pegawai dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 29 orang atau sebesar 36,25 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros lebih di dominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.3**Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	SMA/SMK	43	53,75
2	Diploma	3	3,75
3	Strata 1	27	33,75
4	Strata 2	7	8,75
Jumlah Total		80	100

Sumber: Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian DISBUDPAR Kab. Maros 2017

Berdasarkan uraian dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan SMA/SMK berjumlah 43 orang atau sebesar 53,75 persen, sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma berjumlah 3 orang atau sebesar 3,75 persen. Adapun pegawai yang memiliki tingkat

pendidikan Strata 1 (S1) berjumlah 27 orang atau sebesar 33,75 persen dan pegawai yang memiliki tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 7 orang atau sebesar 8,75 persen. Dengan demikian, maka penulis menyimpulkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan pegawai yang bekerja pada kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros adalah tingkat pendidikan SMA/SMK. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kinerja para pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros, sebab tingkat pemahaman akan tugas dan fungsi kerja dipengaruhi oleh sejauh mana tingkat pendidikan yang diperoleh para pegawai.

Tabel 4.4

Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Sub Bagian	3
5	Kepala Seksi	11
6	Pengumpul dan Pengolah Data	9
7	Pengurus Barang/Penyimpan Barang	2
8	Pengadministrasi	6
9	Operator Komputer	5
10	Bendahara	6
11	Penyuluh	1
12	Pengemudi	1
13	Koordinator Pemeliharaan	1
14	Pengelola Arsip	1
15	Petugas Dokumentasi	1
16	Pengagenda Surat	1
17	Petugas Loker	9
18	Petugas Retribusi	3
19	Petugas Jaga Pintu Depan	7
20	Petugas Parkir	6
21	Petugas Rumah Adat	1

Jumlah Total	80
---------------------	-----------

Sumber: Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian DISBUDPAR Kab. Maros 2017

Sesuai dengan uraian dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jabatan Kepala dan Sekretaris Dinas masing-masing berjumlah 1 orang, untuk jabatan Kepala Bidang (Kabid) berjumlah 4 orang yang terbagi atas Kabid. Ekonomi Kreatif, Kabid. Kebudayaan, Kabid. Pariwisata, dan Kabid. Kesenian. Adapun jabatan Kepala Sub Bagian (Kasubag) berjumlah 3 orang yang terdiri atas Kasubag. Umum, Asset dan Kepegawaian, Kasubag. Keuangan, dan Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan. Sedangkan untuk jabatan Kepala Seksi (Kasi) masing-masing berjumlah 11 orang yang terbagi ke dalam Kasi. Sejarah dan Budaya Tradisional, Kasi. Pelestarian Budaya Lembaga Adat, Kasi. Sarana dan Prasarana Kesenian, Kasi. Cagar Budaya dan Museum Daerah, Kasi. Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif, Kasi. Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kasi. Pemasaran dan Promosi Pariwisata, Kasi. Pengembangan SDM dan Prestasi Kesenian, Kasi. Pembinaan dan Pengembangan Kesenian, Kasi. Usaha Jasa Pariwisata, serta Kasi. SDM dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif. Untuk jabatan Pengumpul dan Pengolah Data berjumlah 9 orang, jabatan Pengurus Barang/Penyimpan Barang berjumlah 2 orang dan jabatan Pengadministrasi berjumlah 6 orang.

Lebih lanjut untuk jabatan Operator Komputer berjumlah 5 orang, jabatan Bendahara berjumlah 6 orang yang terdiri atas Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu berjumlah 3 orang, dan Bendahara Pengeluaran. Sedangkan untuk jabatan Penyuluh, Pengemudi, Koordinator Pemeliharaan, Pengelola Arsip, Petugas Dokumentasi, dan

Pengagenda Surat masing-masing berjumlah 1 orang. Untuk jabatan Petugas Loker berjumlah 9 orang, jabatan Petugas Retribusi berjumlah 3 orang, jabatan Petugas Jaga Pintu Depan berjumlah 7 orang, jabatan Petugas Parkir berjumlah 6 orang dan jabatan Petugas Rumah Adat berjumlah 1 orang.

Tabel 4.5

Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	0-5 Tahun	3	3,75
2	6-10 Tahun	47	58,75
3	11-20 Tahun	20	25,00
4	21-30 Tahun	7	8,75
5	>30 Tahun	3	3,75
Jumlah Total		80	100

Sumber: Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian DISBUDPAR Kab. Maros 2017

Berdasarkan uraian dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pegawai dengan masa kerja 0-5 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 3,75 persen, sedangkan pegawai yang telah memiliki masa kerja 6-10 tahun berjumlah 47 orang atau sebesar 58,75 persen. Adapun pegawai yang memiliki masa kerja antara 11-20 tahun berjumlah 20 orang atau sebesar 25 persen, pegawai yang memiliki masa kerja antara 21-30 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 8,75 persen dan pegawai yang telah memiliki masa kerja di atas 30 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 3,75 persen. Dengan demikian maka, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan pegawai pada kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros, memiliki masa kerja yang sudah cukup lama, yaitu berkisar antara 6-20 tahun. Dengan masa kerja yang sudah cukup lama

tersebut, dapat dikatakan bahwa rata-rata pegawai sudah memiliki pengalaman kerja yang cukup baik.

Tabel 4.6

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Tingkat

No	Golongan Tingkat	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Golongan IV	5	6,25
2	Golongan III	31	38,75
3	Golongan II	38	47,5
4	Golongan I	6	7,5
Jumlah Total		80	100

Sumber: Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian DISBUDPAR Kab. Maros 2017

Sesuai dengan uraian dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki golongan tingkat IV berjumlah 5 orang atau sebesar 6,25 persen. Pegawai dengan golongan tingkat III berjumlah 31 orang atau sebesar 38,75 persen, sedangkan pegawai yang memiliki golongan tingkat II berjumlah 38 orang atau sebesar 47,5 persen dan pegawai yang memiliki golongan tingkat I berjumlah 6 orang atau sebesar 7,5 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja pada kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros lebih didominasi oleh pegawai yang memiliki golongan tingkat II dengan jumlah 38 orang atau sebesar 47,5 persen.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan daerah, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan telah berperan penting dalam

peningkatan pemahaman keragaman budaya, serta pengembangan interaksi antarbudaya. Sementara itu dalam pembangunan kepariwisataan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros berperan penting sebagai penyelenggara pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan budaya yang hidup di dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

3. Struktur Organisasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros merupakan salah satu alat pemerintah daerah yang tugasnya menjalankan sebagian urusan rumah tangga daerah yang berdasarkan hak dan ketentuan-ketentuan dalam rangka Otonomi Daerah yang diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) untuk melaksanakan kewenangan penuh yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Maros. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros dipimpin oleh kepala dinas yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) dibagi dalam beberapa Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Seksi. Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menurut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maros

dan Peraturan Bupati Maros Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

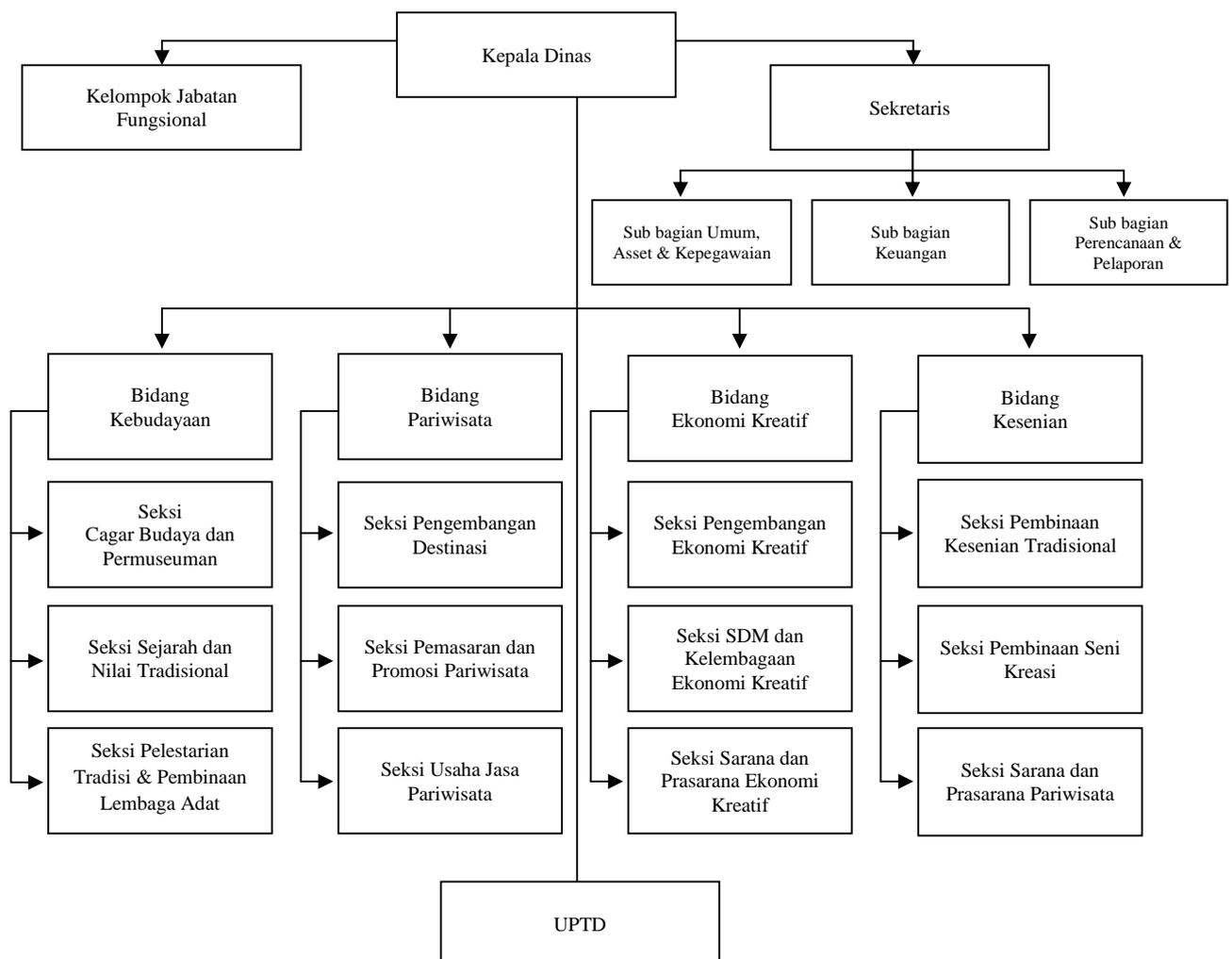
- a. Kepala Dinas
- b. Sekertariat
- c. Bidang-bidang dan Seksi:
 1. Bidang Kebudayaan dan Sejarah terdiri dari:
 - a) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
 - b) Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional
 - c) Seksi Pelestarian Tradisi dan Pembinaan Lembaga Adat
 2. Bidang Kepariwisata terdiri dari:
 - a) Seksi Pengembangan Destinasi
 - b) Seksi Pemasaran dan Promosi Pariwisata
 - c) Seksi Usaha Jasa Pariwisata
 3. Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari:
 - a) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - b) Seksi SDM dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif
 4. Bidang Kesenian terdiri dari:
 - a) Seksi Pembinaan Kesenian Tradisional
 - b) Seksi Pembinaan Seni Kreasi
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata
- d) Sub Bagian:
 - 1) Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Maros



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros
(sumber: Kasubag. Umum, Asset dan Kepegawaian DISBUDPAR Kab. Maros 2017)

B. Manajemen Pariwisata Air Terjun Bantimurung Kabupaten Maros

Sebagaimana diketahui bahwa Pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan suatu daerah. Dengan manajemen yang baik, suatu obyek wisata dapat menjadi sumber pendapatan yang besar. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada pasal 3 menyebutkan kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang beragam dan dapat dijadikan potensi daya tarik wisata untuk dikembangkan menjadi sebuah daerah tujuan wisata, salah satu daerah tujuan wisata khususnya di Kabupaten Maros adalah air terjun Bantimurung yang terdapat di Kecamatan Bantimurung. Selain air terjun sebagai salah satu objek wisata yang digemari oleh para wisatawan (domestik/mancanegara) terdapat pula objek wisata yang lain seperti goa mimpi dan goa batu. Berbagai macam objek wisata dan budaya yang terdapat di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, tentunya akan semakin menarik para wisatawan yang ingin memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sekaligus sebagai tempat untuk menikmati keindahan alam dan budaya.

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Bantimurung perlu memerlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga pengelolaan objek wisata air terjun Bantimurung harus dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan mengacu kepada 4 (empat) poin utama sebagai tolok ukur dalam mencapai

tujuan kepariwisataan yang diinginkan. Adapun 4 (empat) poin utama yang mesti diperhatikan adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sehingga pengelolaan objek-objek wisata yang terdapat di Kecamatan Bantimurung akan dapat dimaksimalkan.

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros dan aparat Balai Taman Nasional Bantimurung untuk menetapkan berbagai program-program dengan tujuan agar jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kab. Maros dan pergerakan wisatawan lokal dan domestik dapat meningkat. Selain itu, meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah sekaligus meningkatkan kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya yang ada di sekitar wilayah air terjun Bantimurung.

a. Penetapan Tujuan

Sebagaimana diketahui bahwa untuk meningkatkan daya tarik wisata yang berada di sekitar Taman Nasional Bantimurung, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros perlu menetapkan sebuah tujuan yang mampu meningkatkan ketertarikan para wisatawan baik lokal maupun mancanegara dengan cara memperhatikan berbagai sarana dan prasarana wisata, atraksi dan pelayanan wisata.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak RHB, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros terkait penetapan tujuan adalah sebagai berikut:

“Tujuan utama dari pengelolaan air terjun Bantimurung ini yang pertama adalah untuk pemasukan PAD Kabupaten Maros. Yang kedua adalah untuk menjaga habitat dan populasi utamanya yang masuk dalam kawasan wisata alam dan yang ketiga adalah melahirkan sinergitas antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan TN. Bantimurung agar tercipta kesinambungan dalam rangka pelestarian sumber daya alam yang berada di kawasan TN. Bantimurung”. (Hasil wawancara dengan Bapak RHB, pada tanggal 3 April 2017).

Berdasarkan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwadalam hal ini setidaknya ada 3 (tiga) tujuan utama yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros yang memiliki kewenangan untuk mengelola objek wisata air terjun Bantimurung. Tujuan yang pertama adalah sebagai kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang kepariwisataan. Tujuan yang kedua adalah untuk menjaga habitat dan populasi yang berada dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung (baik kondisi alam sekitar maupun hewan). Dan yang ketiga adalah untuk melahirkan sinergitas antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros dengan TN. Bantimurung agar tercipta kesinambungan dalam rangka pelestarian sumber daya alam yang berada di kawasan TN. Bantimurung (termasuk nilai-nilai budaya yang berada di kawasan tersebut).

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, dimana program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros dalam rangka pengelolaan Taman Nasional

Bantimurung bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan (baik lokal maupun mancanegara) dengan mengadakan perbaikan sarana dan prasarana wisata, pelayanan kepariwisataan di TN. Bantimurung termasuk mengadakan festival budaya yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Sehingga dengan demikian, maka akan semakin menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung di wilayah TN. Bantimurung sekaligus sebagai kontribusi dalam peningkatan PAD Kabupaten Maros. Selain itu juga di Kabupaten Maros tidak hanya TN Bntimurung saja masih ada objek wisata lainnya. Dapat di lihat di tabel 4.7 dibawah ini :

Tabel. 4.7
Obyek wisata di Kabupaten Maros

No.	Obyek Pariwisata	Pengunjung tahun 2015	Pengunjung tahun 2016
1.	Kolam Renang	4.160	3706
2.	TPS Leang-Leang	10.666	1398
3.	TN Bantimurung	441.839	803.017

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Maros

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah pengunjung pada ketiga obyek wisata/rekreasi tersebut berfluktuasi. Dari tabel diatas dapat diketahui juga bahwa TN Bantimurung masih menjadi barometer dalam pengembangan obyek wisata di Kabupaten Maros. Dari ketiga Obyek wisata di Kabupaten Maros hasil penerimaan tahun 2015 adalah sebesar 1.222.567.800 dan tahun 2016 1.977.432.200. Jika dilihat pendapatan setiap tahunnya meningkat, ditargetkan ditahun 2017 pendapatan yang akan diperoleh sebesar 3.536.382.067. Penerimaan ini pada dasarnya adalah potensi penerimaan pengelolaan UPTD Bantimurung terhadap PAD.

Semua pariwisata yang terdapat di Kabupaten Maros sangat berpengaruh terhadap penerimaan PAD sehingga sangat perlu dilakukan manajemen yang baik untuk memikat para wisatawan asing ataupun domestik datang ke Maros. Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Ibu DRM, selaku Kepala Bidang Pariwisata terkait penetapan tujuan adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya dalam pengelolaan Taman Nasional Bantimurung khususnya air terjun dan objek alam yang lain seperti goa batu ini, kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan berbagai tujuan yang telah dituangkan ke dalam arah kebijakan dan strategi. Seperti meningkatkan kesadaran dan pemahaman jati diri dan karakter masyarakat, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman serta kreativitas nilai budaya dan film serta meningkatkan kualitas pengelolaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya”. (Hasil wawancara dengan Ibu DRM, pada tanggal 4 April 2017).

Sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan Taman Nasional Bantimurung tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros telah menetapkan beberapa macam tujuan yang dituangkan ke dalam arah kebijakan dan strategi program kegiatan. Sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Nasional Bantimurung, para aparat memiliki arah yang jelas dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penetapan tujuan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros, telah tertuang ke dalam arah kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan Taman Nasional Bantimurung. Sehingga dengan demikian dalam proses pencapaian tujuannya, para aparat memiliki arah yang jelas dan tetap fokus kepada pencapaian yang diinginkan.

Adapun arah kebijakan dan strategi pengelolaan tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh informan di atas yakni meningkatkan kesadaran dan pemahaman jati diri dan karakter masyarakat, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman serta kreativitas nilai budaya dan film serta meningkatkan kualitas pengelolaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya.

b. Arah Tindakan

Arah tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan atau program-program yang dijalankan oleh aparat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros bekerja sama dengan aparat Taman Nasional Bantimurung dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya arah tindakan ini, diharapkan para aparat dapat lebih terfokus dengan kegiatan yang dilakukannya dan tidak keluar dari jalur yang program yang telah diberikan.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak SMR, selaku Kepala Bidang Ekonomi Kreatif terkait arah tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

“Adapun arah-arah tindakan yang kami lakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama memberikan fasilitas sarana pendukung untuk memudahkan para wisatawan atau pengunjung agar dapat menikmati berbagai macam objek wisata yang ada di kawasan TN. Bantimurung ini. Yang kedua adalah senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk pemerintah Desa dalam peningkatan pelayanan kepariwisataan”. (Hasil wawancara dengan Bapak SMR, pada tanggal 3 April 2017).

Berdasarkan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) arah tindakan yang dilakukan dalam rangkan pencapaian tujuan pengelolaan kawasan Taman Nasional Bantimurung. Arah tindakan pertama

adalah dengan memberikan fasilitas sarana pendukung bagi para wisatawan atau pengunjung yang ingin menikmati berbagai macam objek wisata seperti air terjun Bantimurung, kawasan goa batu, goa mimpi, berbagai macam fauna seperti Musang Sulawesi (*MacrogolidiaMussenbraecki*), Kelelawar, Kera Sulawesi (*MacacaMaura*), Kuskus (*PhalangerCelebensis*) dan berbagai jenis kupu-kupu. Selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait utamanya pemerintah Desa dalam hal keamanan pengunjung, panduan wisata dan retribusi.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, yang menemukan bahwa perbaikan dan peningkatan fasilitas pariwisata di Taman Nasional Bantimurung menjadi faktor penting dalam menarik para wisatawan yang datang berkunjung di kawasan tersebut. Sebagai salah satu contoh adalah perbaikan sarana permandian air terjun Bantimurung, peningkatan keamanan para pengunjung dan penyediaan transportasi yang memudahkan para wisatawan untuk berkunjung di kawasan Bantimurung.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Bapak ASN, selaku Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata terkait arah tindakan adalah sebagai berikut:

“Jadi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka setidaknya kami selaku pemerintah melakukan tindakan pembenahan yang dianggap perlu di kawasan Taman Nasional Bantimurung seperti pembenahan sarana transportasi, pembenahan sarana permandian, termasuk pembenahan sistem keamanan yang dianggap masih perlu ditingkatkan agar para wisatawan merasa aman, selain itu peningkatan kualitas pelayanan oleh para aparat juga menjadi hal penting yang mutlak dilakukan”. (Hasil wawancara dengan Bapak ASN, pada tanggal 4 April 2017).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa arah tindakan yang juga harus diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan adalah dengan melakukan berbagai macam pembenahan yang

dianggap perlu seperti pembenahan sarana transportasi wisata, pembenahan sarana permandian dan pembenahan sistem keamanan. Dalam hal ini pembenahan sistem keamanan dilakukan agar para wisatawan yang datang berkunjung di Taman Nasional Bantimurung merasa aman dan nyaman. Selain hal tersebut, informan menambahkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh para aparat/petugas mutlak harus ditingkatkan sehingga memberikan kesan positif bagi para pengunjung.

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan setidaknya terdapat beberapa arah tindakan yang harus dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros. Arah tindakan tersebut yang pertama adalah peningkatan sarana pendukung fasilitas untuk memudahkan para wisatawan atau pengunjung agar dapat menikmati berbagai macam objek wisata yang ada di kawasan TN. Bantimurung. Yang kedua adalah menjalin koordinasi utamanya dengan pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Desa. Ketiga, dengan melakukan berbagai pembenahan sarana transportasi dan sarana permandian yang termasuk dalam kawasan TN. Bantimurung. Keempat, meningkatkan sistem keamanan terutama bagi para wisatawan. Dan yang kelima adalah meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat kepada para pengunjung sehingga dapat memberikan kesan positif.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Sebagaimana diketahui bahwa pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Demikian halnya dengan pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros dalam mengelola objek wisata kawasan Bantimurung untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diinginkan. Pengorganisasian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan sumber daya baik sumber daya manusia maupun *financial* dan penyusunan aktivitas kegiatan.

a. Pengaturan Sumber Daya

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sebuah organisasi pemerintah pengaturan berbagai sumber daya (baik manusia maupun keuangan) sangat diperlukan agar dalam proses pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengaturan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Demikian halnya dengan pengaturan sumber daya keuangan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak MRD, selaku Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Prestasi Kesenian terkait pengaturan sumber daya adalah sebagai berikut:

“Jadi untuk memanage anggota yang bertugas di Taman Nasional Bantimurung, kita sudah membagi sesuai dengan tugas pokok yang ada di kawasan taman wisata alam yang langsung dikelola oleh kepala Seksi Jasa Usaha. Nah di bawah naungan Seksi Jasa Usaha inilah semua anggota yang ada akan dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing agar setiap pekerjaan yang diberikan dapat dilakukan sesuai dengan instruksi yang ada”. (Hasil wawancara dengan Bapak MRD, pada tanggal 5 April 2017).

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa untuk memenage aparat yang bertugas di kawasan Taman Nasional Bantimurung pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros telah melakukan pembagian tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pembagian tugas tersebut di bawah pengelolaan dan wewenang seksi jasa usaha, yang membagi tugas kepada masing-masing aparat sesuai dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang dimiliki sehingga pekerjaan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan instruksi.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti selama di lapangan yang menunjukkan bahwa masing-masing aparat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros dan petugas Taman Nasional Bantimurung memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Sebagai contoh terdapat aparat yang diberikan tugas sebagai operator komputer, aparat yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengolah data, dan ada pula aparat yang bertugas sebagai petugas retribusi.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Ibu FTM, selaku Kepala Seksi SDM dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif terkait pengaturan sumber daya adalah sebagai berikut:

“Masing-masing aparat telah diberikan pelatihan untuk menangani berbagai tugas yang akan diberikan. Hal ini tentu saja pelatihan yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, sehingga dalam menjalankan tugasnya nanti mereka akan dapat menjalankannya dengan baik dan sesuai dengan arahan dari Kasi. Jasa Usaha. Selain itu, pelatihan yang diberikan berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan”. (Hasil wawancara dengan Ibu FTM, pada tanggal 6 April 2017).

Sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing aparat sebelumnya telah diberikan pelatihan untuk menjalankan tugas-tugasnya nanti. Hal ini tentu saja pelatihan yang berkaitan dengan tugas di kawasan Taman Nasional Bantimurung dan di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para aparat dalam menjalankan tugasnya dan sekaligus sebagai cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan khususnya bagi para wisatawan.

Berdasarkan uraian dari kedua informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan sumber daya aparat khususnya di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros dan Taman Nasional Bantimurung dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan memberikan pelatihan kepada para aparat untuk memudahkan mereka dalam menjalankan berbagai tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kedua adalah dengan mengelompokkan aparat sesuai dengan tingkat kemampuan dan

kompetensi yang dimilikinya sehingga dalam pelaksanaan tugas dilapangan nanti akan dapat dijalankan dengan baik dan benar.

b. Penyusunan Aktivitas Kegiatan

Penyusunan aktivitas kegiatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan rencana program yang akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Bantimurung dalam rangka memperkenalkan objek wisata dan keragaman budaya yang terdapat di sekitar wilayah air terjun Bantimurung sekaligus sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kepada para pengunjung.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak ARS, selaku Kasi. Pemasaran dan Promosi Pariwisata terkait penyusunan aktivitas kegiatan adalah sebagai berikut:

“Jadi terkait dengan penyusunan aktivitas kegiatan di Taman Nasional Bantimurung ini, kami dari pihak pengelola sudah tentu mengacu kepada SOP yang ada. Selain itu aktivitas yang dijalankan harus sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah dibuat, seperti untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman jati diri dan karakter masyarakat maka, penyusunan kegiatannya dilakukan dengan cara revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai tradisi yang ada di sekitar Taman Nasional Bantimurung atau dengan cara memberdayakan komunitas adat”. (Hasil wawancara dengan Bapak ARS, pada tanggal 10 April 2017).

Berdasarkan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa untuk menyusun aktivitas kegiatan khususnya di sekitar kawasan TN. Bantimurung, maka pihak pengelola dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros harus mengacu kepada SOP yang ada dan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah disepakati.

Sebagai contoh untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman jati diri dan karakter masyarakat maka, penyusunan kegiatannya dilakukan dengan cara revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai tradisi yang ada di sekitar Taman Nasional Bantimurung atau dengan cara memberdayakan komunitas adat.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi penulis selama di lapangan yang menemukan bahwa, aktivitas-aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh aparat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros diaktualisasikan ke dalam berbagai bentuk kegiatan tradisi budaya khususnya yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Bantimurung dengan melibatkan berbagai pihak utamanya masyarakat dan tokoh adat. Kegiatan yang dilaksanakan seperti Tari *maggiri* adalah sebuah tarian yang dipertunjukkan oleh seorang *bissu*, oleh karenanya tarian ini dikenal pula dengan nama tari *mabbissu*. *Bissu* adalah yaitu seorang wanita pria (*waria*) dalam kepercayaan Bugis yang dipercayakan menjadi penghubung antara dewa di langit dengan manusia biasa. Tari *Maggiri* ini, berarti menusuk-nusukkan keris ke tubuh *bissu*, terutama ke daerah-daerah yang vital seperti leher, perut, dan pergelangan tangan. Para *bissu* yang melakukan pertunjukan tarian ini dianggap kemasukan roh dan mendapat kemampuan kebal pada senjata tajam. Selanjutnya upacara adat *Appalili*, adalah suatu rangkaian upacara adat sebelum memasuki musim tanam padidan ada pula upacara *Mappa Dandang*, yang pagelaran atraksi kesenian tradisional, seperti tarian tradisional, pencak silat dan lain-lain. Keseluruhan aktivitas kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkenalkan keanekaragaman

nilai-nilai budaya dan tradisi yang terdapat di Kabupaten Maros sekaligus untuk menarik minat para wisatawan agar mau datang berkunjung.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak MHD, selaku Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan terkait penyusunan aktivitas kegiatan adalah sebagai berikut:

“Ada beberapa langkah yang kami lakukan terkait hal tersebut, yang pertama dengan berperan aktif dalam mengikuti setiap even pariwisata baik itu pameran skala lokal maupun regional. Selain itu kami bekerja sama dengan beberapa daerah kabupaten lain dalam rangka mempromosikan potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Maros khususnya di Taman Nasional Bantimurung. Sedangkan khusus untuk beberapa wilayah di dalam kota, kami melakukan wisata pendidikan dimana market sharenya adalah anak Sekolah Dasar dan SMP dengan memberikan fasilitas khusus agar mereka semakin tertarik untuk datang ke wilayah Bantimurung ini”. (Hasil wawancara dengan Bapak MHD, pada tanggal 10 April 2017).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros. Adapun langkah pertama adalah dengan berperan aktif dalam setiap kegiatan atau even pariwisata baik itu pameran skala lokal maupun regional. Yang kedua dengan mengadakan hubungan kerja sama dengan beberapa daerah kabupaten di Sulawesi Selatan dalam rangka mempromosikan potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Maros khususnya di Taman Nasional Bantimurung. Dan melaksanakan wisata pendidikan yang diperuntukkan oleh para pelajar tingkat Sekolah Dasar dan SMP dengan memberikan fasilitas khusus agar mereka tertarik untuk datang ke kawasan wisata Bantimurung.

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan aktivitas kegiatan ini pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros mengacu kepada SOP dan arah kebijakan yang telah ada. Untuk selanjutnya diaktualisasikan ke dalam berbagai program-program kegiatan seperti pertunjukan budaya, even pariwisata baik skala lokal maupun regional, melakukan hubungan kerja sama dengan pemerintah kabupaten lain di Sulawesi Selatan termasuk bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menarik minat para wisatawan sekaligus sebagai media untuk mempromosikan berbagai objek wisata alam dan budaya yang terdapat disekitar wilayah Bantimurung.

3. Penggerakan (*actuating*)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penggerakan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Terry dalam Sarwoto (1981: 86), yang menjelaskan bahwa penggerakan adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompoknya berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Demikian halnya penggerakan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros untuk menggerakkan setiap anggotanya dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini bagaimana para aparat yang diberikan tugas dan tanggung jawab mampu meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata khususnya yang berada di kawasan Bantimurung.

a. Penggerakan Anggota

Penggerakan anggota yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana para aparat yang bertugas di kawasan Taman Nasional Bantimurung mau bekerja secara ikhlas dan bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros harus memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing aparat sehingga dalam pelaksanaan kerja di lapangan dapat berjalan dengan baik.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak MMD, selaku Kasubag. Umum, Asset dan Kepegawaian terkait penggerakan anggota adalah sebagai berikut:

“Ada beberapa cara yang kami lakukan agar mereka mau bekerja secara maksimal, seperti menjelaskan tujuan dari pelaksanaan tugas-tugas yang akan mereka jalankan, selanjutnya adalah meyakinkan mereka bahwa setiap pekerjaan yang dijalankan dengan baik maka tujuan akan dapat diraih secara maksimal. Dan untuk memberikan motivasi kepada setiap aparat, kami biasanya memberikan penghargaan kepada para aparat yang dianggap berprestasi dalam tugasnya. Saya kira pemberian penghargaan semacam ini juga berlaku pada dinas-dinas yang lain”. (Hasil wawancara dengan Bapak MMD, pada tanggal 11 April 2017).

Berdasarkan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa dalam menggerakkan anggota khususnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros, terdapat beberapa cara yang biasa digunakan agar para aparat yang bertugas di kawasan Taman Nasional Bantimurung mau bekerja secara ikhlas dan dapat bekerja sama satu sama lain. Adapun cara yang digunakan antara lain: (1) menjelaskan tujuan yang sebenarnya dari tugas yang mereka jalankan; (2) menenangkan keyakinan kepada masing-masing aparat yang bertugas di kawasan Taman Nasional Bantimurung bahwa setiap tujuan akan

dicapai bila mereka dapat bekerja dengan baik pula; (3) memberikan *reward* kepada aparat yang dianggap berprestasi dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi penulis selama di lapangan yang menemukan bahwa penggerakan anggota pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros didasarkan atas pemberian motif (motivasi) terhadap para aparat yang bertugas. Hal ini biasanya dilakukan oleh Kasi. Usaha Jasa selaku pimpinan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan secara langsung mengenai aset objek wisata kawasan Bantimurung yang bekerja sama dengan Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung. Selain itu, penulis juga menemukan adanya pertemuan rutin yang diadakan di Balai Taman Nasional Bantimurung untuk melakukan evaluasi baik mengenai masalah kinerja aparat yang bertugas di kawasan wisata maupun target yang belum dan telah tercapai dalam kurun waktu tertentu.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak AMR, selaku petugas jaga pintu depan taman wisata Bantimurung terkait penggerakan anggota adalah sebagai berikut:

“Biasanya pertiga bulan kami mengadakan rapat internal bersama Kasi Usaha Usaha Jasa dan pimpinan di Balai Taman Nasional Bantimurung untuk mengevaluasi berbagai program dan tugas-tugas yang kami jalankan. Hal ini sebenarnya pertemuan rutin yang dilakukan, biasanya Bapak Kasi Usaha Jasa memberikan dorongan kepada kami para petugas untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja”. (Hasil wawancara dengan Bapak AMR, pada tanggal 13 April 2017).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa penggerakan anggota pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR)

Kabupaten Maros biasanya dilakukan dengan mengadakan rapat internal atau rapat rutin. Dalam pelaksanaannya para aparat diberikan dorongan atau motivasi oleh Kasi Usaha Jasa dan Pimpinan Balai Taman Nasional untuk tetap menjaga kualitas pelayanan dan meningkatkan kinerja. Ditambahkan oleh informan bahwa pertemuan tersebut sekaligus untuk melakukan evaluasi berbagai program dan tugas yang dijalankan oleh masing-masing aparat.

Berdasarkan penjelasan oleh kedua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggerakan anggota khususnya aparat/petugas kawasan Taman Nasional Bantimurung harus dilakukan secara rutin guna memberikan motivasi agar mereka (aparat/petugas) mau bekerja secara sama dan ikhlas dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Penggerakan anggota dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama dengan menjelaskan tujuan sebenarnya dari tugas-tugas yang diberikan, kedua meyakinkan kepada masing-masing anggota bahwa tujuan akan dapat tercapai secara maksimal jika mereka bekerja dengan baik dan ketiga memberika penghargaan kepada para aparat/petugas yang dianggap memiliki kinerja yang baik. Sehingga dengan demikian, maka dengan sendirinya penggerakan anggota akan dapat direalisasikan dengan lancar dan terkendali.

b. Kerja Sama

Kerja sama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan interaksi yang terjalin antar sesama aparat/petugas yang bekerja di Balai Taman Nasional Bantimurung untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam hal ini adalah meningkatkan kualitas layanan kepada para wisatawan termasuk di dalamnya hubungan komunikasi secara aktif dengan sesama aparat.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak MHR, selaku petugas loket Taman Nasional Bantimurung terkait kerja sama yang dilakukan adalah sebagai berikut:

“Biasanya kami sering melakukan pergantian tugas jaga (*shift*), terkadang saling bertukar informasi mengenai keadaan di kawasan Taman Nasional Bantimurung ini dengan petugas lain. Kalau saya biasanya sering berkomunikasi dengan petugas pengolah data dan petugas retribusi”. (Hasil wawancara dengan Bapak MHR, pada tanggal 10 April 2017).

Berdasarkan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa para petugas/aparat di kawasan Taman Nasional Bantimurung biasanya melakukan pergantian tugas jaga (*shift*) sesuai dengan jadwal yang telah diatur. Kerja sama juga terkadang dapat dilihat dari bentuk hubungan komunikasi yang terjadi diantara sesama petugas/aparat baik antar sesama petugas loket maupun petugas lain dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung dengan tujuan memberikan informasi tentang keadaan atau situasi yang sedang terjadi.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis yang menemukan bahwa masing-masing aparat/petugas yang diberikan tanggung jawab dan wewenang di kawasan Taman Nasional Bantimurung senantiasa saling bertukar informasi terkait keadaan atau kondisi yang terjadi. Hal ini merupakan aktivitas yang rutin dilakukan oleh para aparat mengingat pembagian tugas yang diberikan kepada mereka berbeda-beda sehingga informasi merupakan hal yang bersifat urgen untuk diketahui oleh para petugas yang lain. Sebagai contoh pemberian informasi mengenai jumlah wisatawan yang berkunjung di kawasan Taman Nasional Bantimurung, jumlah tiket/karcis masuk, ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata. Sehingga dengan adanya pemberian informasi tersebut,

maka akan semakin memudahkan para aparat yang lain untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak MCH, selaku petugas retribusi Taman Nasional Bantimurung terkait kerja sama yang dilakukan adalah sebagai berikut:

“Saya kira proses kerja sama antar sesama aparat merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan karena semua tugas-tugas yang diberikan saling berkaitan. Kami juga selaku petugas retribusi perlu mengetahui informasi tersebut yang berkaitan dengan penagihan dan tarif retribusi yang dikenakan baik kepada pengusaha warung makan, dan para pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar kawasan Taman Nasional Bantimurung untuk kemudian mendata mereka yang belum terdata”. (Hasil wawancara dengan Bapak MCH, pada tanggal 11 April 2017).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa proses kerja sama yang terjadi antara sesama petugas/aparat di Balai Taman Nasional Bantimurung merupakan hal yang mutlak dilakukan. Mengingat setiap tugas yang dijalankan saling terkait, sehingga dengan adanya pemberian informasi tersebut akan semakin memudahkan aparat lain dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Ditambahkan oleh informan bahwa dalam bidang tugas penarikan retribusi, mereka memerlukan informasi yang terkait dengan jumlah para pengusaha yang berjualan termasuk para pedagang kaki lima sehingga mereka dapat dengan mudah melakukan penarikan retribusi dan mendata para penjual tersebut.

Hal di atas senada dengan yang disampaikan oleh Bapak ASN, selaku Kasi Usaha Jasa terkait kerja sama yang dilakukan oleh para aparat di Taman Nasional Bantimurung adalah sebagai berikut:

“Saya kira mereka telah bekerja sama dengan baik, hal ini memang senantiasa kami ingatkan kepada para petugas bahwa informasi-informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan wisata Bantimurung ini harus senantiasa disampaikan kepada petugas yang lain sehingga akan memberikan kemudahan dan dengan adanya informasi tersebut, maka proses dalam mengevaluasi kekurangan-keurangan yang terjadi di kawasan objek wisata tersebut baik terkait mengenai pelayanan atau fasilitas-fasilitas pendukung lainnya akan dapat dicarikan solusinya”. (Hasil wawancara dengan Bapak ASN, pada tanggal 11 April 2017).

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerja sama merupakan hal yang penting dilakukan oleh sesama anggota organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian halnya kerja sama yang dilakukan oleh aparat/petugas di Balai Taman Nasional Bantimurung. Kerja sama petugas/aparat Balai Taman Nasional Bantimurung biasanya dilakukan dengan cara pertukaran informasi mengenai tugas-tugas yang dijalankan. Sebab terdapat saling keterkaitan diantara tugas yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh informan bahwa pertukaran informasi mengenai situasi atau kondisi yang terjadi akan memudahkan mereka dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya sekaligus sebagai sebuah sarana untuk mengevaluasi berbagai program-program yang telah dijalankan selama ini yang pada gilirannya dapat melahirkan solusi baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembenahan fasilitas kepariwisataan.

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan (*controlling*) merupakan penemuan dan penerapancara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakansesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Sutarno, NS (2004: 128), bahwa pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur

yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan atau kontrol yang dilakukan oleh Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros dan Balai Taman Nasional Bantimurung dilakukan untuk mengetahui apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencanasebelumnya atau telah sesuai dengan SOP dan arah kebijakan yang ada serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan taman wisata Bantimurung.

a. Standar Kegiatan

Standar kegiatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan dan petunjuk dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Bantimurung yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros yang bekerja sama dengan Balai Taman Nasional bantimurung selaku pelaksana teknis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas pelayanan, pembenahan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Ibu DRM, selaku Kabid.

Pariwisata terkait standar kegiatan adalah sebagai berikut:

“Terkait mengenai standar kegiatan pengelolaan taman wisata alam Bantimurung saya kira harus mengacu kepada desain tapak yang telah dibuat seperti penerapan zonasi dan teknik manajemen pengelolaan pengunjung, fasilitas wisata berupa *visitor centre* harus terkonsentrasi terdiri atas: pusat informasi, kios, rumah makan, ruang pandang/dengar,

museum, P3K, toilet, tempat parkir, akomodasi dan lain-lain”. (hasil wawancara dengan Ibu DRM, pada tanggal 6 April 2017).

Berdasarkan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa standar kegiatan pengelolaan kawasan wisata Bantimurung harus sesuai dengan desai tapak yang telah dibuat dalam hal ini desain tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Kawasan Wisata Bantimurung Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung tahun 2015. Standar kegiatan tersebut dapat berupa penerapan zonasi dan teknik manajemen pengelolaan pengunjung, fasilitas wisata berupa *visitor centre* harus terkonsentrasi terdiri atas: pusat informasi, kios, rumah makan, ruang pandang/dengar, museum, P3K, toilet, tempat parkir, akomodasi dan lain-lain.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis yang menemukan bahwa Pemerintah dalam upaya mengikutsertakan berbagai pihak termasuk masyarakat lokal untuk bersama-sama mengelola taman nasional mengakomodirnya lewat pengelolaan kolaboratif. Dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros dengan Balai Taman Nasional Bantimurung dan masyarakat yang berada di wilayah sekitar. Sehingga dengan demikian akan mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat lokal tersebut dan sekaligus sebagai upaya dalam ikut melestarikan dan menjaga berbagai kehidupan flora dan fauna yang terdapat di dalamnya.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak MRD, selaku Kasi. Pengembangan SDM dan Prestasi Kesenian terkait standar kegiatan adalah sebagai berikut:

“Jadi standar kegiatan yang dilakukan ini harus searah dengan sasaran strategis pengelolaan yang ditetapkan. Kami selaku pihak yang bertanggung jawab berupaya untuk melakukan pengembangan pengelolaan

pariwisata alam sebaik mungkin yang diperuntukkan bagi ruang publik dan ruang usaha penyediaan jasa/sarana pariwisata alamsesuai dengan kaidah, prinsip dan fungsi konservasi alam”. (Hasil wawancara dengan Bapak MRD, pada tanggal 4 April 2017).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa standar kegiatan harus searah dengan sasaran strategis pengelolaan yang sudah ditetapkan. Dimana pihak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros berupaya untuk melakukan pengembangan pariwisata alam dengan tetap menjaga kelestarian alam yang diperuntukkan bagi ruang publik dan ruang usaha penyediaan jasa/sarana pariwisata alamsesuai dengan kaidah, prinsip dan fungsi konservasi alam.

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan Taman Nasional Bantimurung terdapat standar-standar kegiatan yang harus diperhatikan oleh pihak pengelola dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros dan Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung diantaranya adalah mengenai penerapan zonasi dan teknik manajemen pengelolaan pengunjung, fasilitas wisata berupa *visitor centre*, ukuran ruang atau area yang digunakan, sumberdaya hidupan liar (*wildlife*) yang meliputi komponen penyebaran, jumlah, dan keanekaragaman spesies.

b. Penilaian Kegiatan

Penilaian kegiatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terkait program-program pengelolaan kawasan wisata Bantimurung baik mengenai program pelestarian lingkungan yang diperuntukkan bagi kehidupanmahluk yang menghuninya. Selain itu kegiatan yang diarahkan pada peningkatan potensi obyek

dan daya tarik wisata/ODTW (*attractions*), aksesibilitas pariwisata (*accessibility*) serta fasilitas pariwisata (*amenity*) yang telah berkembang di dalam dan sekitar wilayah Taman Nasional Bantimurung.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak DWK, selaku Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung terkait penilaian kegiatan adalah sebagai berikut:

“Mengenai penilaian kegiatan pengelolaan wisata alam Bantimurung-Bulusaraung ada beberapa standar penilaian seperti kegiatan pengelolaan harus dilakukan secara ekologis, yang kedua kegiatan pengelolaan tersebut harus diarahkan bagi kesehatan manusia dan lingkungan serta menghadirkan nilai-nilai lokalitas”. (Hasil wawancara dengan Bapak DWK, pada tanggal 6 April 2017).

Berdasarkan uraian penjelasan dari informan di atas, dapat diketahui bahwa standar penilaian sebuah kegiatan pengelolaan wisata alam Bantimurung harus didasarkan pada beberapa acuan teknis seperti kegiatan pengelolaan harus dilakukan secara ekologis, yang kedua kegiatan pengelolaan tersebut harus diarahkan bagi kesehatan manusia dan lingkungan serta menghadirkan nilai-nilai lokalitas.

Hal ini sesuai dengan observasi penulis yang menemukan bahwa kegiatan pengelolaan Taman Nasional Bantimurung tersebut dilakukan berdasarkan konsep pendekatan dan desain tapak kawasan wisata Bantimurung dimana pembagian ruang pengelolaan pariwisata alam di antaranya di zona pemanfaatan harus diperuntukkan untuk ruang publik dan ruang usaha penyediaan jasa/sarana pariwisata alam. Selain itu, pengelolaan taman wisata alam Bantimurung bersifat indikatif, strategis, kualitatif, dan kuantitatif serta disusun dengan mempertimbangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga setiap

kegiatan pengelolaan yang dilakukan tidak menimbulkan dampak yang negatif baik bagi kelestarian alam maupun masyarakat.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak DDA, selaku Kasubag TU Balai TN. Bantimurung Bulusaraung terkait penilaian kegiatan adalah sebagai berikut:

“Ada beberapa kriteria penilaian kegiatan pengelolaan berdasarkan desain tapak yang dibuat diantaranya adalah apakah kegiatan pengelolaan yang dilakukan memperhatikan sensitifitas budaya, tradisi dan agama setempat, sebagaimana halnya dengan sumberdaya alam dan lingkungan, merupakan modal penunjang dalam daya tarik wisata. Selain itu apakah kegiatan pengelolaan tidak mengganggu lintasan satwa yang ada di kawasan tersebut”. (Hasil wawancara dengan Bapak DDA, pada tanggal 10 April 2017).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan pengelolaan di kawasan Taman Nasional Bantimurung setidaknya harus memperhatikan sensitifitas budaya, tradisi dan agama setempat, sebagaimana halnya dengan sumberdaya alam dan lingkungan, merupakan modal penunjang dalam daya tarik wisata. Yang kedua adalah kegiatan pengelolaan tersebut tidak mengganggu lintasan satwa yang berada di lokasi tersebut, sehingga tidak menimbulkan pengrusakan terhadap habitat satwa atau mengusik kehidupan satwa yang mendiami kawasan Taman Nasional Bantimurung.

Berdasarkan penjelasan oleh kedua informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa standar penilaian kegiatan pengelolaan kawasan wisata Bantimurung setidaknya harus memperhatikan beberapa kriteria yaitu: (1) kegiatan pengelolaan harus dilakukan secara ekologis; (2) kegiatan pengelolaan tersebut harus diarahkan bagi kesehatan manusia dan lingkungan; (3) menghadirkan nilai-nilai lokalitas; (4) memperhatikan sensitifitas budaya, tradisi

dan agama setempat; dan (5) tidak mengganggu lintasan satwa yang ada di kawasan tersebut. Sehingga dengan memperhatikan beberapa standar penilaian kegiatan tersebut diharapkan kegiatan pengelolaan kawasan wisata di Taman Nasional Bantimurung dapat berjalan dengan efektif dan efisien sebagaimana tujuan yang diinginkan.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Pariwisata Air Terjun Bantimurung

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mengembangkan pariwisata tidak cukup sekedar membangun objek wisata, pariwisata juga harus memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi minat para wisatawan yang datang berkunjung. Faktor-faktor tersebut dapat berupa obyek dan atraksi wisata, sarana dan prasarana kepariwisataan yang mampu memberikan kemudahan akses bagi wisatawan, serta pelayanan kepariwisataan itu sendiri. Ketiga hal tersebut tentu saja harus menjadi pertimbangan bagi para aparat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros dan juga pihak Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

1. Obyek dan Atraksi Wisata

Obyek dan atraksi wisata adalah dua hal yang menjadi daya tarik utama dari sebuah tempat tujuan wisata. Atraksi wisata merupakan satu hasil karya masyarakat yang dipersembahkan sebagai bagian untuk menarik minat para wisatawan dan memiliki tujuan demi memberikan kesan kesenangan karena masih berisi hiburan. Ketika ada obyek wisata alam (baik pantai, gunung, ngarai,

dan lain-lain), maka atraksi wisata merupakan obyek yang lebih cenderung menggali pada kemampuan manusia, yaitu dengan memberdayakan diri pada kreasi dan inovasi budaya setempat. Walau begitu, kenyataannya keberadaan atraksi wisata ini tidak bisa dilepaskan dari faktor alam dan juga faktor kebudayaan setempat, dimana keberadaannya dituntut mampu memberikan kesan mendalam bagi para wisatawan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka obyek dan atraksi wisata merupakan hal yang mempengaruhi minat para wisatawan untuk datang berkunjung ke suatu lokasi atau wilayah wisata. Demikian halnya obyek-obyek wisata yang terdapat di Taman Nasional Bantimurung Kabupaten Maros harus dapat menarik minat para pengunjung dengan menyuguhkan berbagai atraksi wisata yang erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya lokal.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak RHB, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros terkait obyek dan atraksi wisata adalah sebagai berikut:

“Saya kira obyek dan atraksi wisata di kawasan Taman Nasional Bantimurung ini sangat menarik, bukan hanya karena keindahan alamnya yang terbentuk secara alami tetapi juga yang terpenting adalah kondisi sosial budaya masyarakat yang berada di sekitar wilayah taman nasional yang unik dan mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Berbagai macam pagelaran budaya setiap tahunnya diadakan di wilayah ini”. (Hasil wawancara dengan Bapak RHB, pada tanggal 3 April 2017).

Berdasarkan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa obyek dan atraksi wisata yang terdapat di kawasan Taman Nasional Bantimurung sangat menarik. Hal ini bukan saja ditunjang oleh keindahan alam yang terbentuk secara alami seperti air terjun, telaga Kassikebo dan Toakala, Gua Batu dan

berbagai macam keragaman hayati. Tetapi juga berbagai atraksi budaya tradisional masyarakat yang berada di sekitar Taman Nasional Bantimurung sehingga mampu menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi penulis yang menemukan bahwa selain obyek wisata yang terdapat di kawasan Taman Nasional Bantimurung juga terdapat beberapa peninggalan budaya seperti kawasan situs prasejarah Leang-leang, situs prasejarah Leang Akkarrasa Rammang-rammang, kompleks makam Karaeng Simbang dan lain-lain. Selain itu suguhan atraksi budaya yang dapat menarik minat para wisatawan seperti upacara adat Appalili, upacara adat Katto Bokko, upacara Mappa Dendang, lomba perahu hias dan prosesi pencucian benda-benda pusaka kerajaan yang rutin diadakan setahun sekali.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Ibu RSM, selaku Kabid.

Kesenian terkait obyek dan atraksi wisata adalah sebagai berikut:

“Tempat tujuan wisata yang baik adalah tempat yang harus mampu memberikan kesan dan pengalaman berharga bagi wisatawan. Kesan dan pengalaman inilah yang akan membuat wisatawan mempertimbangkan untuk melakukan kunjungannya kembali. Nah dengan adanya berbagai obyek wisata alam di kawasan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung serta suguhan atraksi-atraksi budaya yang diberikan, kami selaku pihak pengelola yakin akan mampu meningkatkan jumlah pengunjung kedepannya”. (Hasil wawancara dengan Ibu RSM, pada tanggal 11 April 2017).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa dengan adanya berbagai macam obyek wisata alam (baik wisata sejarah, wisata argo dan wisata budaya) di kawasan Taman Nasional Bantimurung dan suguhan berbagai atraksi-atraksi budaya masyarakat lokal akan semakin menambah

ketertarikan para wisatawan. Ditambahkan oleh informan bahwa Tempat tujuan wisata yang baik adalah tempat yang harus mampu memberikan kesan dan pengalaman berharga bagi wisatawan. Kesan dan pengalaman inilah yang akan membuat wisatawan mempertimbangkan untuk melakukan kunjungannya kembali.

Berdasarkan penjelasan oleh kedua informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa obyek dan atraksi wisata merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kepariwisataan. Objek dan atraksi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik bagi wisatawan agar mau berkunjung ke daerah tersebut. Demikian halnya obyek dan atraksi wisata yang terdapat di sekitar wilayah Taman Nasional Bantimurung perlu untuk dikembangkan sehingga mampu menarik minat para wisatawan. Obyek wisata di kawasan Taman Nasional Bantimurung dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu obyek wisata alam (seperti air terjun, goa batu, dan goa mimpi), obyek wisata sejarah (seperti taman prasejarah Leang-leang, situs prasejarah leang akkarrasa Rammang-rammang, dan lain-lain) serta obyek wisata argo. Sedangkan untuk atraksi wisata yang sering diadakan atau dipentaskan dapat berupa upacara adat Appalili, upacara adat Katto Bokko, upacara Mappa Dendang, lomba perahu hias dan prosesi pencucian benda-benda pusaka kerajaan.

2. Fasilitas Pariwisata

Fasilitas pariwisata merupakan suatu sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros dan Balai Taman Nasional Bantimurung-

Bulusaraung untuk kebutuhan wisatawan. Hal ini dikarenakan kebutuhan para wisatawan bukan hanya terletak pada keindahan alam atau keunikan obyek wisata yang dimiliki oleh Taman Nasional Bantimurung, tetapi juga terkait dengan sarana dan prasarana wisata seperti akomodasi (sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, komunikasi, tempat hiburan, hotel/penginapan, restoran, dan toko cinderamata), transportasi (tersedianya jalan alternatif, aspal, hotmik, dan setapak), kendaraan (angkutan umum, ojek dan sepeda), tempat ibadah (musholah), areal parkir, MCK dan *shetler*.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Ibu TRA, selaku Kasi. Sarana dan Prasarana Kesenian terkait fasilitas pariwisata adalah sebagai berikut:

“Pada umumnya sarana dan prasarana pariwisata seperti penginapan, rumah makan/restoran, travel dan perbankan di Kabupaten Maros cukup lengkap. Hotel, restoran, dan biro perjalanan wisata semuanya ada di pusat kota apalagi kita punya bandara dan terminal angkutan umum dan pada umumnya semua obyek wisata yang ada di Maros itu bisa di akses dengan lancar oleh kendaraan”. (hasil wawancara dengan Ibu TRA, pada tanggal 17 April 2017).

Berdasarkan penjelasan informan di atas, dapat diketahui sarana dan prasarana yang terdapat di Kabupaten Maros dalam rangka mendukung berkembang dan berjalan lancarnya sektor pariwisata cukup lengkap. Hal ini dapat dilihat dari adanya sarana dan prasarana penunjang seperti penginapan, rumah makan/restoran, travel dan perbankan. Ditambahkan oleh informan bahwa hotel, restoran, dan biro perjalanan wisata semuanya ada di pusat kota dan ditunjang dengan bandara dan terminal angkutan umum dan pada umumnya semua obyek wisata yang ada di Maros dapat di akses dengan lancar oleh kendaraan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi penulis selama di lapangan mengenai kondisi fasilitas (sarana dan prasarana) pariwisata dalam hal ini hotel, restoran/rumah makan, perbankan, dan travel yang ada di Kabupaten Maros dapat diketahui bahwa pada umumnya kondisi sarana dan prasarana pariwisata sudah lengkap dan semuanya tersedia di pusat kota. Sementara itu penginapan hanya tersedia di obyek wisata Bantimurung dan Leang-leang, sedangkan obyek wisata lain belum memiliki penginapan tetap. Tetapi, jika pengunjung ingin menginap ada beberapa warga sekitar yang menyediakan beberapa kamar di rumahnya untuk disewakan kepada para pengunjung. Sedangkan akomodasi menuju obyek wisata semuanya tersedia di terminal angkutan umum Marusu baik kendaraan roda empat “Pete-pete” dan kendaraan roda dua “Ojek” yang melayani semua rute menuju obyek-obyek wisata.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak ASN, selaku Kasi.

Usaha Jasa Pariwisata terkait fasilitas pariwisata adalah sebagai berikut:

“Pada umumnya fasilitas yang tersedia di beberapa obyek wisata khususnya yang berada di wilayah Taman Nasional Bantimurung ini sudah cukup lengkap, hanya saja perlu pembenahan di beberapa fasilitas yang sudah usang seperti baruga/gazebo, papan informasi dan menara pengawas. Selain itu saya kira sarana dan prasarana yang lain sudah cukup memadai”. (Hasil wawancara dengan Bapak ASN, pada tanggal 17 April 2017).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa fasilitas pariwisata (baik sarana dan prasarana) yang terdapat di kawasan Taman Nasional Bantimurung sudah cukup memadai. Namun demikian, masih terdapat beberapa infrastruktur kepariwisataan yang perlu dibenahi agar semakin mengundang daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung. Selain itu, sarana dan

prasarana kepariwisataan yang berada di kawasan Taman Nasional Bantimurung harus dapat memberikan akses kemudahan bagi para wisatawan.

Berdasarkan penjelasan oleh kedua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas pariwisata merupakan hal pokok yang harus disediakan oleh pihak pengelola pariwisata dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros dan Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung dalam rangka memberikan akses kemudahan bagi siapa saja yang ingin menikmati obyek wisata yang terdapat di dalamnya. Selain itu sarana dan prasarana yang tersedia dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap pengunjung sehingga mereka akan tertarik untuk datang kembali.

3. Pelayanan Kepariwisata

Pelayanan pariwisata merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pelayanan kepariwisataan dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Oleh karena itu, aparat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros dan Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung harus mampu memberikan pelayanan kepada para wisatawan sehingga dapat menjadi salah satu faktor yang mendatangkan lebih banyak wisatawan untuk datang untuk berkunjung ke kawasan Taman Nasional Bantimurung.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak ERH, selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros terkait pelayanan kepariwisataan adalah sebagai berikut:

“Kami sudah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada para wisatawan yang datang berkunjung ke Taman Nasional Bantimurung ini. Salah satunya dengan melakukan program kegiatan yang berorientasi budaya tradisional yang melibatkan masyarakat disekitar kawasan ini, selain itu tahun ini kami mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam hal perbaikan dan pembenahan sarana dan prasarana obyek wisata Bantimurung-Bulusaraung dengan harapan akan semakin menarik minat para wisatwan baik lokal maupun mancanegara”. (Hasil wawancara dengan Bapak ERH, pada tanggal 18 April 2017).

Berdasarkan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa dalam peningkatan kualitas pelayanan di bidang kepariwisataan khususnya yang berada di kawasan Taman Nasional Bantimurung, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros dan Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung telah melakukan berbagai upaya yang dapat menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung. Diantaranya adalah dengan mengadakan kegiatan atau festival budaya tradisional yang melibatkan masyarakat lokal serta melakukan pembenahan dan perbaikan berbagai sarana dan prasarana kepariwisataan dengan harapan akan semakin menarik minat para wisatwan baik lokal maupun mancanegara.

Hal senada diungkapkan oleh Bapak MHR, selaku petugas loket Taman Wisata Bantimurung-Bulusaraung terkait pelayanan kepariwisataan adalah sebagai berikut:

“Kalau saya melihat memang sudah ada beberapa fasilitas-fasilitas di kawasan Bantimurung ini yang telah dibenahi baik itu gazebo, museum kupu-kupu, kolam renang anak bahkan papan informasi sudah diperbaharui. Saya kira ini sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan pelayanan kepada wisatawan dengan memberikan berbagai macam kemudahan dan kenyamanan”. (Hasil wawancara dengan Bapak MHR, pada tanggal 18 April 2017).

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan di atas, maka dapat disimpulkan pelayanan kepariwisataan merupakan hal yang mempengaruhi tingkat kepuasan para wisatawan yang pada gilirannya akan berdampak kepada tingkat kedatangan pengunjung dan pemasukan PAD Kabupaten Maros. Oleh karena itu berbagai upaya yang telah dijelaskan oleh informan di atas, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros dan Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung dalam meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan akses baik infrastruktur, sarana dan prasarana kepariwisataan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros dan pada Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung mengenai manajemen pariwisata air terjun Bantimurung. Maka dari itu, penulis dapat menyimpulkan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan pariwisata Bantimurung harus sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun arah kebijakan dan sasaran strategis pengelolaan kawasan pariwisata Bantimurung seperti; (a) meningkatkan kesadaran dan pemahaman jati diri dan karakter masyarakat; (b) meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman serta kreativitas nilai budaya dan film; (c) meningkatkan kualitas pengelolaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya.
2. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pariwisata Bantimurung yaitu: (a) Obyek dan Atraksi Wisata yang terdapat di kawasan Bantimurung (hasil budaya dan festival tradisional masyarakat lokal) harus dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai daya pikat tersendiri bagi para wisatawan; (b) Fasilitas Pariwisata berupa sarana dan prasarana harus dapat dibenahi untuk memberikan akses kemudahan bagi pengunjung; dan (c) Pelayanan Kepariwisataaan harus mampu ditingkatkan agar memberikan kepuasan kepada para pengunjung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros dan pada Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung mengenai manajemen pariwisata air terjun Bantimurung dan melihat permasalahan yang terjadi, maka dari itu peneliti menyarankan:

1. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Maros untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan yang berbasis budaya lokal, kesehatan dan kelestarian lingkungan sekitar yang tidak mengganggu habitat fauna yang terdapat di dalamnya. Selain itu pembenahan fasilitas penunjang pariwisata untuk lebih diperhatikan dalam menarik dan meningkatkan daya tarik wisatawan.
2. Bagi Balai Taman Nasional Bantimurung_Bulusaraung untuk tetap melaksanakan program-program berdasarkan sasaran strategis pengelolaan dan arah kebijakan baik dari sisi fisik dan ekologis, teknis, serta sisi sosial ekonomi dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2014. *Taman Nasional Bantimurung: Mengunjungi Surga Keanekaragaman Kupu-kupu Nusantara*. Sumber: <http://www.travelesia.co/>. diakses pada tanggal 16 April 2016, pada pukul 21.15 Wita.
- Asriady, Dedi. 2015. *Pengembangan Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung*. Sumber: <http://www.tn-babul.org/>. Diakses pada tanggal 16 April 2016, pada pukul 20.05 Wita.
- Atik, Septi Winarsih, dan Ratminto. 2012. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cholih, Abdul. 2011. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendika.
- Damanik, Jonathan, dan Weber, Helmut. 2006. *Perencanaan Ekowisata Dari Teori Ke Aplikasi*. Yogyakarta: PUSPAR UGM dan Andi Offset.
- Darsoprajitno, H Soewarno. 2002. *Ekologi Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Dowling, RK dan Fennel, DA. 2003. *Konteks Kebijakan Ekowisata dan Perencanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadwin. 2015. *Pariwisata dan Manajemen Pariwisata*. Sumber: <http://hadwinsaleh5.blogspot.co.id/2013/01/pariwisata-dan-manajemen-pariwisata.html>. Diakses pada tanggal 16 April 2016, pada pukul 18.21 Wita.
- Handoko, T Hani. 2008. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- . 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengertian, Dasar, dan Masalah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Manullang, M. 1982. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Happy. 2002. *Pengantar Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Panggabean, Mutiara S. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Pitana, I Gede dan Diarta Surya I Ketut. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Purwanto, Djoko. 2006. *Komunikasi Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Rachmat. 1986. *Manajemen Suatu Pengantar*. Bandung: Remadja Karya.
- Richardson, I.J dan Fluker, Martin. 2004. *Memahami dan Mengelola Pariwisata*. Australia: Pearson Education Australia.
- Safroni, Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya: Aditya Media Publishing.
- Samsudin, Sadili. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sastrohadiwiryo, B Siswanto. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekadijo. 2000. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- . 1996. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutiarso, MA. 2004. *Ekowisata Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Jawa Timur*. Tesis Kajian Pariwisata Unud.
- Terry, George dan Rue Leslie W. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Cetakan Ke sebelas. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Wakka, Abd. Kadir dan Awang San Afri. 2015. *Strategi Akomodasi Kepentingan Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Di Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan Balai Penelitian Kehutanan Makassar, Vol. 12.
- Yoeti, A Oka. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Pradnya Paramita.
- . 1997. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Edisi Revisi. Bandung: Angkasa.